

**KETERKAITAN ANTARA PERTUMBUHAN
EKONOMI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
(Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2000-2004)**



TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Lulus Prapti NSS
C4B000123

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
Desember
2006**

**INTERRELATEDNESS ECONOMIC GROWTH AND INCOME
DISTRIBUTION
(Case Study in 35 Regencies/Cities of Central Java, 2001-2004).**

ABSTRACT

The aims of this thesis analyzed interrelatedness economic growth and income distribution in 35 regencies/cities of Central Java and then are correlated to Hypothesis by Simon Kuznets. According to hypothesis of Kuznets that are beginning of development, high economic growth will be followed highly income disparitas too.

This research used time series data, from 2000-2004. Data collection is taken by BPS of Central Java. This research used tipology diagram method to analyzed interrelatedness economic growth and income disparitas in 35 regencies/cities of Central Java. Tipology diagram consist of Kuadran I, Kuadran II, Kuadran III, and Kuadran III. Kuadran I contents of regions with high economic growth and high income disparitas. Kuadran II contents of regions with low economic growth and high income disparitas. Kuadran III contents of regions with low economic growth and low income disparitas. Kuadran IV contents of regions with high economic growth and low income disparitas.

The result of this research show that although income disparitas in 35 regencies/cities of Central Java are relatively low, because under 0,3, but almost of 35 regencies/cities of Central Java have been interrelatedness economic growth and income disparitas.

At 2001, amount of regencies/cities have been interrelatedness economic growth and income disparitas are 22. At 2002, amount of regencies/cities have been interrelatedness economic growth and income disparitas are 23. At 2003, amount of regencies/cities have been interrelatedness economic growth and income disparitas are 26. At 2004, amount of regencies/cities have been interrelatedness economic growth and income disparitas are 27.

During 2001-2004, regencies/cities are still at Kuadran I are Surakarta city. regencies/cities are still at Kuadran III are Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Blora, Pati, Kudus, Batang, Pekalongan dan Pemalang regencies. And then regencies/cities are still at Kuadran IV are Tegal regency dan Tegal city.

Key word : Economic Growth, Income Disparitas, Index Gini Ratio

Lulus Prapti NSS

**KETERKAITAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DISTRIBUSI
PENDAPATAN
(Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2000-2004)**

ABSTRAKSI

Tesis ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah dengan mengkorelasikannya pada hipotesis “U” terbalik yang diajukan Simon Kuznets. Di mana menurut Kuznets pada awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti dengan ketimpangan pendapatan antar penduduk yang tinggi pula.

Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder runtut waktu dari tahun 2000 – 2004. Data angka pertumbuhan ekonomi dan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk di masing-masing Kabupaten/Kota berasal dari angka perhitungan yang dilakukan BPS. Sedangkan untuk melihat pola keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ketimpangan penduduk yang terjadi pada suatu wilayah kabupaten/kota digunakan diagram tipologi yang terdiri atas 4 kuadran. Kuadran I adalah wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk tinggi. Kuadran II adalah wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi rendah namun tingkat kesenjangan pendapatan penduduk tinggi. Kuadran III adalah wilayah yang pertumbuhan ekonominya rendah dan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk juga rendah. Kuadran IV adalah wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi tingkat kesenjangan pendapatan antar masyarakat rendah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah relatif rendah (masih di bawah 0,3), namun keterkaitan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan meningkatnya tingkat kesenjangan pendapatan penduduk terjadi di sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pada tahun 2001 Kabupaten/Kota yang mengalami kondisi seperti ini berjumlah 22 Kabupaten/Kota, pada tahun 2002 meningkat menjadi 23 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2003 meningkat menjadi 26 Kabupaten/Kota dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 27 Kabupaten/Kota.

Pada periode tahun 2001-2004, Kabupaten/Kota yang berada pada posisi statis adalah Kota Surakarta yang selalu berada di Kuadran I. Sementara yang selalu berada di kuadran III adalah Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Blora, Pati, Kudus, Batang, Pekalongan dan Pemalang. Sedang yang selalu berada di kuadran IV adalah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Pendapatan, Indeks Gini Rasio

Lulus Prapti NSS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS	8
2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik	8
2.1.1. Adam Smith	8
2.1.2. David Ricardo	11
2.2. Hipotesis U Terbalik Tentang Ketimpangan	12
2.3. Distribusi Pendapatan	17
2.3.1. Kurve Lorenz	21
2.3.2. Koefisien Gini	23
2.3.3. Teori Distribusi Pendapatan Kaldor	24
2.4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan	27
2.5. Penelitian Terdahulu	29
2.6. Kerangka Pemikiran Teoritis	30
BAB III METODE PENELITIAN	31

3.1. Jenis Penelitian	31
3.2. Definisi Operasional Variabel	31
3.3. Jenis dan Sumber Data	32
3.4. Analisa Data	32
3.4.1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	32
3.4.2. Koefisien Gini Rasio	33
3.4.3. Tabel Tipologi Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan	33
BAB IV GAMBARAN UMUM PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMERATAAN PENDAPATAN PENDUDUK DI KABUPATEN / KOTA JAWA TENGAH	36
4.1. Kabupaten Cilacap	36
4.2. Kabupaten Banyumas	38
4.3. Kabupaten Purbalingga	40
4.4. Kabupaten Banjarnegara	42
4.5. Kabupaten Kebumen	44
4.6. Kabupaten Purworejo	46
4.7. Kabupaten Wonosobo	48
4.8. Kabupaten Magelang	50
4.9. Kabupaten Boyolali	52
4.10. Kabupaten Klaten	54
4.11. Kabupaten Sukoharjo	56
4.12. Kabupaten Wonogiri	58
4.13. Kabupaten Karanganyar	60
4.14. Kabupaten Sragen	62
4.15. Kabupaten Grobogan	64
4.16. Kabupaten Blora	66
4.17. Kabupaten Rembang	68
4.18. Kabupaten Pati	70
4.19. Kabupaten Kudus	72

4.20. Kabupaten Jepara	74
4.21. Kabupaten Demak	76
4.22. Kabupaten Semarang	78
4.23. Kabupaten Temanggung	80
4.24. Kabupaten Kendal	82
4.25. Kabupaten Batang	84
4.26. Kabupaten Pekalongan	86
4.27. Kabupaten Pemalang	88
4.28. Kabupaten Tegal	90
4.29. Kabupaten Brebes	92
4.30. Kota Magelang	94
4.31. Kota Surakarta	96
4.32. Kota Salatiga	98
4.33. Kota Semarang	100
4.34. Kota Pekalongan	102
4.35. Kota Tegal	104
BAB V HASIL PEMBAHASAN	106
5.1. Pengklasifikasian Pola Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kesenjangan Pendapatan	106
5.1.1. Pola Keterkaitan Tahun 2001	106
5.1.2. Pola Keterkaitan Tahun 2002	108
5.1.3. Pola Keterkaitan Tahun 2003	110
5.1.4. Pola Keterkaitan Tahun 2004	112
5.2. Pola Pergeseran Tipologi 35 Kabupaten/Kota Tahun 2001-2004	113
5.3. Hasil Temuan Analisis	115
BABVI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	117
6.1. Kesimpulan	117
6.2. Rekomendasi	118
Daftar Pustaka	120
Lampiran - Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Tipologi Keterkaitan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dengan Tingkat Kesenjangan Pendapatan	34
Tabel 4.1. Perkembangan PDRB Kabupaten Cilacap Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	36
Tabel 4.2. Gini Rasio Kabupaten Cilacap Tahun 2000 – 2004	37
Tabel 4.3. Perkembangan PDRB Kabupaten Banyumas Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	38
Tabel 4.4. Gini Rasio Kabupaten Banyumas Tahun 2000 – 2004	39
Tabel 4.5. Perkembangan PDRB Kabupaten Purbalingga Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	40
Tabel 4.6. Gini Rasio Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 – 2004	41
Tabel 4.7. Perkembangan PDRB Kabupaten Banjarnegara Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	42
Tabel 4.8. Gini Rasio Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 – 2004	43
Tabel 4.9. Perkembangan PDRB Kabupaten Kebumen Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	44
Tabel 4.10. Gini Rasio Kabupaten Kebumen Tahun 2000 – 2004	45
Tabel 4.11. Perkembangan PDRB Kabupaten Purworejo Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	46
Tabel 4.12. Gini Rasio Kabupaten Purworejo Tahun 2000 – 2004	47
Tabel 4.13. Perkembangan PDRB Kabupaten Wonosobo Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	48
Tabel 4.14. Gini Rasio Kabupaten Wonosobo Tahun 2000 – 2004	49
Tabel 4.15. Perkembangan PDRB Kabupaten Magelang Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	50
Tabel 4.16. Gini Rasio Kabupaten Magelang Tahun 2000 – 2004	51
Tabel 4.17. Perkembangan PDRB Kabupaten Boyolali Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	52

Tabel 4.18.	Gini Rasio Kabupaten Boyolali Tahun 2000 – 2004	53
Tabel 4.19.	Perkembangan PDRB Kabupaten Klaten Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	54
Tabel 4.20.	Gini Rasio Kabupaten Klaten Tahun 2000 – 2004	55
Tabel 4.21.	Perkembangan PDRB Kabupaten Sukoharjo Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	56
Tabel 4.22.	Gini Rasio Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 – 2004	57
Tabel. 4.23.	Perkembangan PDRB Kabupaten Wonogiri Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	58
Tabel. 4.24	Gini Rasio Kabupaten Wonogiri Tahun 2000 – 2004	59
Tabel. 4.25	Perkembangan PDRB Kabupaten Karanganyar Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	60
Tabel 4.26.	Gini Rasio Kabupaten Karanganyar Tahun 2000 – 2004	61
Tabel 4.27.	Perkembangan PDRB Kabupaten Sragen Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	62
Tabel 4.28.	Gini Rasio Kabupaten Sragen Tahun 2000 – 2004	63
Tabel. 4.29.	Perkembangan PDRB Kabupaten Grobogan Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	64
Tabel. 4.30	Gini Rasio Kabupaten Grobogan Tahun 2000 – 2004	65
Tabel. 4.31	Perkembangan PDRB Kabupaten Blora Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	66
Tabel 4.32.	Gini Rasio Kabupaten Blora Tahun 2000 – 2004	67
Tabel 4.33.	Perkembangan PDRB Kabupaten Rembang Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	68
Tabel 4.34.	Gini Rasio Kabupaten Rembang Tahun 2000 – 2004	69
Tabel. 4.35.	Perkembangan PDRB Kabupaten Pati Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	70
Tabel. 4.36	Gini Rasio Kabupaten Pati Tahun 2000 – 2004	71
Tabel. 4.37	Perkembangan PDRB Kabupaten Kudus Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	72
Tabel 4.38.	Gini Rasio Kabupaten Kudus Tahun 2000 – 2004	73

Tabel 4.39.	Perkembangan PDRB Kabupaten Jepara Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	74
Tabel 4.40.	Gini Rasio Kabupaten Jepara Tahun 2000 – 2004	75
Tabel. 4.41	Perkembangan PDRB Kabupaten Demak Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	76
Tabel. 4.42	Gini Rasio Kabupaten Demak Tahun 2000 – 2004	77
Tabel. 4.43	Perkembangan PDRB Kabupaten Semarang Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	78
Tabel 4.44.	Gini Rasio Kabupaten Semarang Tahun 2000 – 2004	79
Tabel 4.45.	Perkembangan PDRB Kabupaten Temanggung Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	80
Tabel 4.46.	Gini Rasio Kabupaten Temanggung Tahun 2000 – 2004	81
Tabel. 4.47.	Perkembangan PDRB Kabupaten Kendal Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	82
Tabel. 4.48.	Gini Rasio Kabupaten Kendal Tahun 2000 – 2004	83
Tabel. 4.49.	Perkembangan PDRB Kabupaten Batang Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	84
Tabel. 4.50.	Gini Rasio Kabupaten Batang Tahun 2000 – 2004	85
Tabel. 4.51.	Perkembangan PDRB Kabupaten Pekalongan Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	86
Tabel. 4.52.	Gini Rasio Kabupaten Pekalongan Tahun 2000 – 2004	87
Tabel 4.53.	Perkembangan PDRB Kabupaten Pemalang Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	88
Tabel 4.54.	Gini Rasio Kabupaten Pemalang Tahun 2000 – 2004	89
Tabel 4.55.	Perkembangan PDRB Kabupaten Tegal Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	90
Tabel. 4.56.	Gini Rasio Kabupaten Tegal Tahun 2000 – 2004	91
Tabel. 4.57.	Perkembangan PDRB Kabupaten Brebes Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	92
Tabel. 4.58.	Gini Rasio Kabupaten Brebes Tahun 2000 – 2004	93

Tabel. 4.59.	Perkembangan PDRB Kota Magelang Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	94
Tabel. 4.60.	Gini Rasio Kota Magelang Tahun 2000 – 2004	95
Tabel 4.61.	Perkembangan PDRB Kota Surakarta Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	96
Tabel 4.62.	Gini Rasio Kota Surakarta Tahun 2000 – 2004	97
Tabel 4.63.	Perkembangan PDRB Kota Salatiga Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	98
Tabel. 4.64.	Gini Rasio Kota Salatiga Tahun 2000 – 2004	99
Tabel. 4.65.	Perkembangan PDRB Kota Semarang Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	100
Tabel. 4.66.	Gini Rasio Kota Semarang Tahun 2000 – 2004	101
Tabel 4.67.	Perkembangan PDRB Kota Pekalongan Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	102
Tabel 4.68.	Gini Rasio Kota Pekalongan Tahun 2000 – 2004	103
Tabel. 4.69.	Perkembangan PDRB Kota Tegal Harga Konstan Tahun 2000 – 2004	104
Tabel. 4.70.	Gini Rasio Kota Tegal Tahun 2000 – 2004	105

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. : Kurva “U” Terbalik (Hipotesis Kuznets)	14
Gambar 2.2. : Kurva Kemungkinan Produksi	18
Gambar 2.3. : Kurva Lorenz	22
Gambar 2.4.: Perkiraan Koefesien Gini	23
Gambar 2.5 : Kerangka Pemikiran Teoritis	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi ini mengandung tiga unsur, yaitu : (1) pembangunan ekonomi sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus menerus yang di dalamnya telah mengandung unsur-unsur kekuatan sendiri untuk investasi baru; (2) usaha meningkatkan pendapatan perkapita; (3) kenaikan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang (Suryana:2000).

Namun sebagai upaya memperbaiki tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat luas, tujuan dasar pembangunan ekonomi tidaklah semata-mata hanya untuk mengejar pertumbuhan PDB atau PDRB, namun juga untuk menciptakan pemerataan pendapatan antar masyarakat. Karena ketidakmerataan distribusi pendapatan masyarakat juga merupakan permasalahan pembangunan (Arsyad:1997).

Masalah ketimpangan pendapatan telah lama menjadi persoalan pelik dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah negara miskin dan berkembang. Menurut Lincoln Arsyad (1997) banyak negara sedang berkembang yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 1960-an mulai menyadari bahwa pertumbuhan yang semacam itu hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi

tinggi gagal untuk mengurangi bahkan menghilangkan besarnya kemiskinan absolut. Dengan kata lain, pertumbuhan GNP per kapita yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Karena apa yang disebut dengan proses "*trickle down effect*" dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi seperti apa yang diharapkan.

Masalah distribusi pendapatan mengandung dua aspek. Aspek pertama adalah bagaimana menaikkan tingkat kesejahteraan mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan, sedang aspek kedua adalah pemerataan pendapatan secara menyeluruh dalam arti mempersempit perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk atau rumah tangga. Keberhasilan mengatasi aspek yang pertama dapat dilihat dari penurunan persentase penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Sementara keberhasilan memperbaiki distribusi pendapatan secara menyeluruh, adalah jika laju pertambahan pendapatan golongan miskin lebih besar dari laju pertambahan pendapatan golongan kaya.

Seperti halnya dalam pembangunan ekonomi nasional, tujuan pembangunan ekonomi daerah juga dimaksud untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah daerah sebagai institusi pelaksana pembangunan di daerah juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan kinerja perekonomian daerah serta memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk mengelola sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan

ekonomi dalam wilayah tersebut (Mudarajad Kuncoro: 2004). Oleh karena itu agar pembangunan ekonomi yang dijalankan dapat mengakomodasikan persoalan-persoalan yang dihadapi daerah dengan efektif dan efisien maka strategi pembangunan yang dilaksanakan harus mengacu pada karakteristik yang dimiliki daerah terutama menyangkut bagaimana mendayagunakan potensi sumber daya manusia, sumber-sumber fisik serta kelembagaan lokal baik yang formal maupun non formal.

Dengan demikian jika mencermati pengertian tersebut maka upaya mengharmonisasikan tujuan pembangunan ekonomi sangat bergantung pada strategi pembangunan ekonomi yang dipilih atau yang dijalankan. Oleh karena itu peran pemerintah daerah melalui serangkaian intervensi kebijakan pembangunan memiliki arti strategis dalam menentukan keberhasilan tujuan pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah Jawa Tengah, sebagai bagian integral dari pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, juga memikul tanggung jawab yang besar. Tantangan yang dewasa ini sedang dihadapi adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang di dalamnya juga terdapat keberhasilan untuk mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat.

Walaupun angka indeks Gini Rasio propinsi Jawa Tengah masih berada pada indikasi yang relatif rendah, namun perkembangannya cenderung terus mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Hal ini nampak nyata sekali pada periode tahun 2001-2003. Pada tahun 2001 ketika tingkat pertumbuhan PDRB sebesar 3,33 %, angka indeks Gni Rasio Jawa Tengah adalah sebesar 0,2495. Pada tahun 2002

tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami peningkatan menjadi menjadi sebesar 3,48 %, angka indek Gini Rasio Jawa Tengah juga meningkat menjadi 0,2524. Pola ini juga terjadi pada tahun 2003.

Dari penggambaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam periode tahun 2001-2003, di perekonomian Jawa Tengah terjadi pola hubungan yang bersifat positif antara peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Artinya ketika perekonomian mengalami peningkatan maka tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat juga meningkat.

Di dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Jawa Tengah 2003 – 2008 secara implisit juga menyatakan bahwa meskipun selama tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif lebih baik. Namun pertumbuhan ekonomi tersebut belum mampu mengangkat kebutuhan Jawa Tengah dalam mengatasi masalah pengangguran.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan sektoral terutama untuk kegiatan sektor industri selalu terkonsentrasi pada daerah-daerah yang relatif lebih maju, sementara untuk daerah yang kurang berkembang tidak menjadi wilayah kegiatan industri. Perbedaan perlakuan inilah yang menyebabkan timbulnya kesenjangan pembangunan antar wilayah dimana daerah maju memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sedangkan wilayah agraris mengalami perlambatan. Adanya perbedaan pertumbuhan inilah yang memicu adanya kesenjangan pendapatan antar masyarakat.

Selain faktor pemusatan kegiatan ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu, kesenjangan pendapatan masyarakat juga diakibatkan oleh persoalan struktural yang terjadi dalam perekonomian, persoalan struktural tersebut antara lain : (1) akses yang tidak sama terhadap teknologi, kredit dan input produktif (2) tingginya tingkat perbedaan konsentrasi kepemilikan modal. (Suharto: 2001). Sementara menurut Moh. Ikhsan (1995), sebab-sebab ketimpangan pendapatan antar individu karena adanya ketidakmerataan kepemilikan sumber daya dan faktor produksi, ketidaksempurnaan pasar serta sistem pajak yang regresif.

Dinamika perkembangan perekonomian propinsi Jawa Tengah adalah dinamika yang terdiri dari seluruh rangkaian kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh semua unsur pelaku ekonomi pada semua strata dan wilayah yang ada di propinsi Jawa Tengah. Artinya fenomena adanya keterkaitan yang positif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat dalam skala yang lebih rendah dapat saja terjadi di beberapa kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah atau mungkin juga tidak terjadi untuk beberapa kabupaten/kota tertentu yang ada di Jawa Tengah.

Berangkat dari keinginan untuk mengkaji lebih mendalam terhadap persoalan tersebut maka penulis mengajukan judul penelitian tesis **”Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Pendapatan, Studi Kasus di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah”**.

1.2. Rumusan Masalah

Beberapa bukti empiris menunjukkan bahwa strategi pembangunan yang terfokus pada peningkatan pendapatan per kapita saja tidak cukup, bahkan menimbulkan ketimpangan dan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan. Ukuran pembangunan dengan pendapatan per kapita memiliki banyak kelemahan-kelemahan tersebut di antaranya : (1) tingkat kesejahteraan seseorang sulit diukur dan subyektif sifatnya; (2) dalam perhitungannya kurang memperhatikan aspek distribusi pendapatan. (Suryana:2000).

Konsepsi di atas mengandung pengertian bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu diikuti dengan keberhasilan dalam mendistribusi hasil-hasilnya. Oleh karena itu, berpijak dari pendapatan sementara tersebut maka rumusan masalah penelitian yang diajukan oleh penulis adalah bagaimana pola keterkaitan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pola keterkaitan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat yang ada di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian.

1. Memberikan sumbangan informasi yang tersistematis mengenai persoalan ekonomi regional terutama tentang keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejangan pendapatan masyarakat di 35 kabupaten/kota.
2. Sebagai tambahan dan guna melengkapi khasanah pengetahuan tentang ekonomi pembangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi (Klasik)

2.1.1. Adam Smith

Dalam Lincolin Arsyad (1997) menerangkan bahwa inti dari dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith dibedakan menjadi dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu:

- a. Pertumbuhan *output* (GDP) total, dan
- b. Pertumbuhan penduduk

Menurut Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumber daya belum digunakan sepenuhnya maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan *output*. Tetapi pertumbuhan *output* tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya alam tersebut telah digunakan sepenuhnya.

Sumber daya manusia (jumlah penduduk) mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan *output*. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat.

Stok modal, menurut Smith merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat *output*. Peranan sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan *output* tergantung pada laju pertumbuhan stok modal (sampai batas maksimum dari sumber daya alam).

Menurut Smith, stok modal (K) mempunyai dua pengaruh terhadap *output* total (Q) yaitu pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung karena penambahan K (yang diikuti oleh penambahan tenaga kerja) akan meningkatkan Q. Makin banyak *input*, makin banyak *output*. Sedangkan pengaruh tidak langsung adalah peningkatan produktifitas per kapita lewat dimungkinkannya tingkat spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih tinggi. Hal ini akan terwujud secara nyata hanya apabila satu syarat lagi terpenuhi yaitu makin luasnya pasar bagi *output* (M).

Proses pertumbuhan *output* akan berulang pada tahun-tahun selanjutnya sampai “ batas atas “ yang dimungkinkan oleh sumber alam yang tersedia. Pada tahap ini proses pertumbuhan berhenti, dan perekonomian telah mencapai posisi stationer (*stationary state*). Pada posisi ini semua proses pertumbuhan berhenti.

Ada dua faktor penunjang penting dibalik proses akumulasi kapital :

1. Makin meluasnya pasar (M)
2. Adanya tingkat keuntungan diatas tingkat keuntungan minimal

Keduanya saling berkaitan, meluasnya pasar berarti bisa dipertahankan tingkat keuntungan pada tingkat tinggi. Perluasan pasar tersebut sebagai syarat kelangsungan proses akumulasi kapital. Potensi pasar akan dicapai setiap warga masyarakat diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk melakukan pertukaran dan kegiatan ekonominya.

Aspek kedua dari pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan penduduk yang bersifat pasif dalam proses pertumbuhan *output*, dalam arti bahwa, dalam jangka panjang berapapun jumlahnya tenaga kerja yang dibutuhkan oleh proses produksi akan tersedia melalui pertumbuhan penduduk.

Penduduk akan meningkat apabila tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah *subsisten*. Sedangkan tingkat upah itu sendiri ditentukan oleh tarik menarik antara kekuatan permintaan dan penawarannya. Tingkat upah akan tinggi apabila permintaan akan tenaga kerja tumbuh lebih cepat daripada penawarannya dan sebaliknya.

Apabila tingkat upah terus merosot dan jatuh dibawah tingkat upah *subsisten*, maka laju pertumbuhan penduduk akan menjadi negatif. Pada tingkat upah *subsisten*, jumlah penduduk konstan.

Permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh stok kapital (K) yang tersedia dan oleh tingkat *output* masyarakat (Q), sebab tenaga kerja “diminta” karena dibutuhkan dalam proses produksi. Oleh sebab itu, laju pertumbuhan permintaan akan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan stok kapital (akumulasi kapital) dan laju pertumbuhan *output*.

2.1.2 David Ricardo

Menurut Lincolin Arsyad (1997), garis besar proses pertumbuhan dan kesimpulan-kesimpulan dari Ricardo tidak jauh berbeda dengan teori Adam Smith. Tema dari proses pertumbuhan ekonomi masih pada perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan *output*. Selain itu Ricardo juga menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (sumber daya alam) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat.

Perekonomian yang di ciri-cirikan Ricardo adalah sebagai berikut:

1. Tanah terbatas
2. Tenaga kerja meningkat atau menurun sesuai dengan tingkat upah diatas atau dibawah tingkat upah minimal (tingkat upah lamamiah/*natural wage*)
3. Akumulasi kapital terjadi apabila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik kapital berada diatas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi
4. Dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi
5. Sektor pertanian dominan

Dari faktor produksi tanah dan tenaga kerja, ada satu kekuatan dinamis yang selalu menarik perekonomian kearah tingkat upah minimum, yaitu bekerjanya *the law of diminishing return*. Pada akumulasi kapital juga berlaku hukum tersebut, Sedangkan yang memperlambat berlakunya hukum tersebut adalah adanya kemajuan tingkat teknologi.

Inti dari proses pertumbuhan ekonomi adalah proses tarik menarik antara dua kekuatan dinamis, yaitu antara :

- a. *The law of diminishing return*, dan
- b. Kemajuan teknologi

Dimana akhirnya *The law of diminishing return* yang akan menang. Keterbatasan faktor produksi tanah akan membatasi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Suatu negara hanya bisa tumbuh sampai batas yang dimungkinkan oleh sumber-sumber alamnya. Apabila potensi sumber alam ini telah dieksploitir secara penuh maka perekonomian berhenti tumbuh, masyarakat akan mencapai posisi *stationernya*.

2.2. Hipotesis U Terbalik Tentang Ketimpangan : Teori Kuznetz

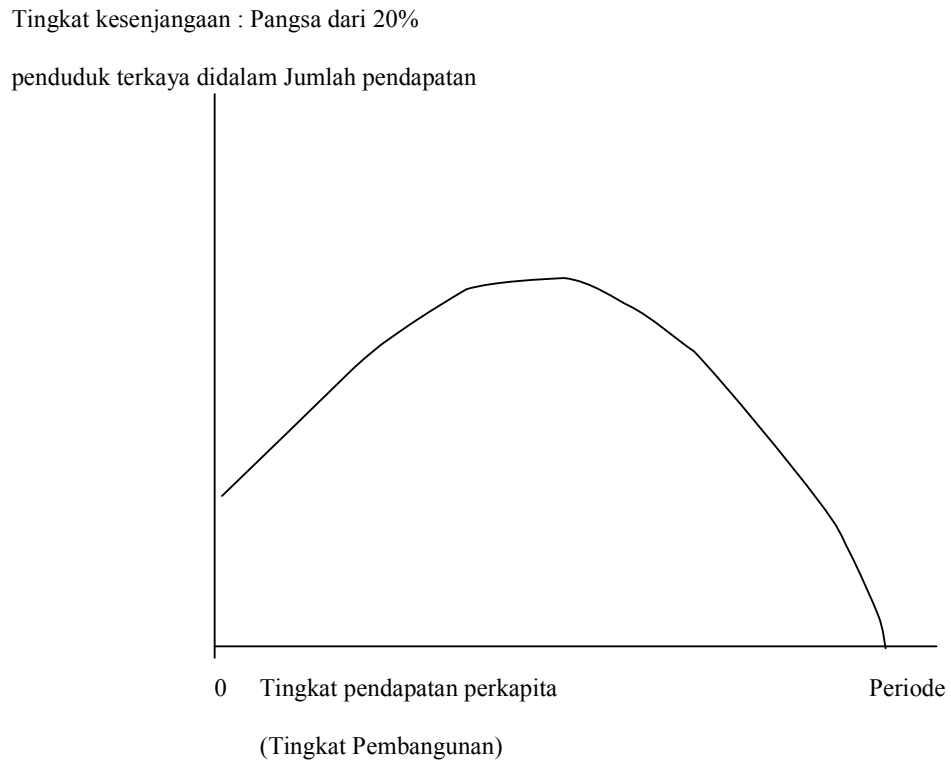
Banyak perhatian yang telah diberikan terhadap bagaimana distribusi pendapatan berubah dalam masa pembangunan. Simon Kuznets (1995) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan semakin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan semakin merata. (Mudrajad Kuncoro:1997).

Berdasarkan hipotesis tersebut, muncul pertanyaan: kenapa terjadi suatu *trade-off* antara pertumbuhan dan kesenjangan ekonomi dan untuk untuk beberapa lama? Atau berdasarkan kerangka pemikiran yang melandasi “hipotesis Kuznetz”, apakah memang terbukti ada suatu korelasi positif jangka panjang setelah beberapa tahun) antara tingkat pendapatan perkapita (atau laju pertumbuhan) dan

tingkat pemerataan dalam distribusi pendapatan atau suatu korelasi negatif antara tingkat pendapatan per kapita dan besarnya kesenjangan pendapatan? Atau, kalau memang benar relasi antara peningkatan pendapatan rata-rata per kapita (yang mencerminkan semakin tingginya tingkat pembangunan ekonomi) dan tingkat kesenjangan pendapatan berbentuk “kurva U terbalik”, sesuai hipotesis Kuznetz, apakah tidak mungkin ketimpangan akan membesar lagi (muncul kurva U terbalik, kedua)

Evolusi kesenjangan dalam distribusi pendapatan pada awalnya didominasi oleh apa yang disebut Hipotesa Kuznetz. Dengan memakai data antar Negara (*cross-section*) dan data dari sejumlah survey/observasi disetiap negara (*time series*), Simon Kusnetz menemukan relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita berbentuk U terbalik. Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi pedesaan (*rural*) ke suatu ekonomi perkotaan (*urban*) atau ekonomi industri. Pada awal proses pembangunan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi; pada akhir proses pembangunan, ketimpangan menurun, yakni pada saat sektor industri di daerah perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pangsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan.

Gambar 2.1
Kurva “U” terbalik (Hipotesa Kuznets)



Ada dua pendapat dari hasil studi empiris yang menguji hipotesis Kuznets, dengan menggunakan data makro dari sejumlah negara yaitu pertama, sebagian besar studi-studi itu mendukung hipotesis Kuznets, sedangkan sebagian lainnya menolak, misalnya, Bruno dkk (1995), Deininger dan Squire (1995,1996) dan Barro (1999) tidak menunjukkan adanya suatu relasi yang sistematis antara pertumbuhan pendapatan dan pola distribusinya. Juga studi dari Papenek (1978) yang mencakup 61 negara menunjukkan relasi antara tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat pembangunan (yang dilihat dari tingkat

pendapatan) tidak signifikan. Walaupun hipotesis itu diterima, namun sebagian besar dari studi-studi tersebut menunjukkan bahwa relasi positif antara pertumbuhan dan pemerataan pada periode jangka panjang hanya terbukti nyata untuk kelompok negara-negara industri maju (kelompok Negara-negara dengan tingkat pendapatan yang tinggi).

Bagian kesenjangan dari kurva Kuznets pada gambar 2.1. cenderung tidak stabil dibanding porsi kesenjangan menurun dari kurva tersebut (bagian kanan). Kesenjangan cenderung menurun untuk negara-negara pada tingkat pendapatan menengah dan tinggi. Jadi sejak bagian kesenjangan dari kurva tersebut terdiri atas negara-negara berpenghasilan rendah hingga menengah, maka relasi itu lebih tidak stabil untuk negara-negara tersebut.

Hasil studi tersebut di atas harus ditanggapi dengan kritis karena pendekatan *cross-section study* mempunyai sejumlah kelemahan, di antaranya adalah pendekatan tersebut tidak memasukkan pengaruh-perngaruh terhadap perkembangan distribusi pendapatan di masing-masing negara secara individu. Misalnya, di suatu negara mungkin saja tingkat kesenjangan pendapatan (yang diukur dengan indeks gini) pada periode sebelumnya (periode $t=0$) sangat berpengaruh terhadap tingkat kesenjangan atau pertumbuhan pendapatan pada saat ini ($t=1$). Dengan menggunakan data *time series* mengenai indek Gini yang didapat dari 486 observasi dari 45 negara berkembang dan maju untuk periode 1947-1993 di Deininger dan Squire (1995, 1996), hasil plot antara indek Gini pada dekade 1970-an dan indek Gini pada dekade 1980-an dan 1990-an menunjukkan adanya suatu korelasi yang positif.

Kemudian pendekatan *cross-section analysis* lainnya. Misalnya Anand dan Kanbur (1993) yang mengkritik hasil analisis Ahluwalia (1976) yang mendukung hipotesis Kuznets. Menurut mereka distribusi pendapatan tidak bisa dibandingkan antara negara karena konsep pendapatan unit populasi dan cakupan surveinya berbeda. Mereka juga mengkritik metodologi yang digunakan Ahluwalia dalam analisisnya yang berkaitan dengan variasi dalam *functional form*: bentuk fungsi yang berbeda (di antara mana data tidak dapat dipilih) dapat mengakibatkan bentuk relasi yang berbeda antara kesenjangan dan tingkat pendapatan. Hasil ulang analisis yang dilakukan oleh Anand dan Kanbur (1993) dengan memakai data dari 60 negara yang sama seperti pada studi Ahluwalia (1976) menolak hipotesis Kuznets.

Sedangkan studi-studi dengan pendekatan analisis *time-series* hanya sebagian yang mendukung kurva Kuznets, misalnya dari Ravallion dan Datt (1996) mengenai India dengan menggunakan logaritma (log) jumlah produk domestik (dalam nilai riil) per orang (1951=0) sebagai proksi dari pendapatann perkapita dan indeks Gini dari konsumsi orang dalam persentase) sebagai proksi dari tingkat kesenjangan. Studi ini menunjukkan bahwa selama periode 1950 hingga awal dekade 1990-an pendapatan rata-rata per kepala meningkat dan kecenderungan perkembangan tingkat kesenjangan ekonomi menunjukkan sudut yang negatif (menurun).

2.3. Distribusi Pendapatan

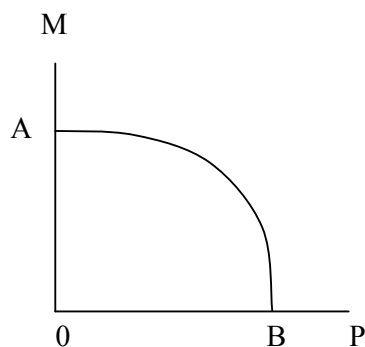
Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan. Walaupun titik perhatian utama kita pada ketidakmerataan distribusi pendapatan dan harta kekayaan (*assets*), namun hal tersebut hanyalah merupakan sebagian kecil dari masalah ketidakmerataan yang lebih luas di NSB. Misalnya ketidakmerataan kekuasaan, prestise, status, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, kebebasan untuk memilih, dan lain-lain.

Lewat pemahaman yang mendalam akan masalah ketidakmerataan dan kemiskinan ini memberikan dasar yang baik untuk menganalisis masalah pembangunan yang lebih khusus seperti: pertumbuhan penduduk, pengangguran, pembangunan pedesaan, pendidikan, perdagangan internasional dan sebagainya. Pembahasan masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan ini sebenarnya sulit untuk dipisahkan. Namun demikian, pada bagian ini lebih ditekankan pada pembahasan masalah distribusi pendapatan dengan menyinggung sedikit masalah kemiskinan.

Pendekatan yang sederhana dalam masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah dengan memakai kerangka kemungkinan produksi (*production Possibility Framework*) (Todaro, 1995). Untuk melukiskan permasalahannya, produksi dalam suatu daerah atau negara dibedakan menjadi dua kelompok barang, yaitu barang kebutuhan pokok (makanan, minuman, pakaian dan perumahan) serta yang kedua barang mewah. Dengan asumsi semua faktor produksi telah dimanfaatkan secara penuh, maka permasalahan yang

muncul adalah bagaimana menentukan kombinasi barang yang akan diproduksi dan bagaimana masyarakat menurut pilihannya. Gambar 2.2 berikut ini memberikan gambaran mengenai masalah ini. Sumbu vertikal menunjukkan jumlah produksi barang mewah, semetara sumbu horizontal menunjukkan jumlah produksi barang kebutuhan pokok. Kurva kemungkinan produksi merupakan tempat kedudukan titik-titik kombinasi kedua barang yang diproduksi secara maksimum. Titik A dan B memberikan gambaran tentang kombinasi produksi antara barang mewah dengan barang kebutuhan pokok dalam tingkat pendapatan yang sama besar. Pada titik A lebih banyak barang mewah yang diproduksi bila dibanding dengan kebutuhan pokok. Sebaliknya pada titik B lebih sedikit barang mewah dihasilkan untuk masyarakat dibandingkan dengan barang kebutuhan pokok.

Gambar 2.2
Kurva Kemungkinan Produksi



Dua negara atau daerah dengan pendapatan per kapita yang sama besar mungkin akan berbeda dalam pola produksi atau konsumsinya. Mereka mungkin berada pada titik yang berbeda pada kurva kemungkinan produksi, tergantung pada tingkat pemerataan distribusi pendapatannya. Bagi negara atau daerah

dengan pendapatan perkapita yang rendah mungkin tidak merata distribusi pendapatannya, semakin besar pengaruh preferensi konsumsi golongan kaya terhadap pola produksi dan permintaan agregat. Walaupun kenyataan golongan kaya hanya merupakan kelompok kecil dalam masyarakat, namun dengan kekuatan daya belinya mereka mampu mempengaruhi pola produksi sehingga mengarah ke barang mewah. Jika distribusi pendapatan lebih merata, pola permintaan akan lebih mendorong produksi ke arah barang kebutuhan pokok dan selanjutnya dapat mengurangi kemiskinan dan tingkat hidup masyarakat.

Distribusi pendapatan sebagai suatu ukuran dibedakan menjadi dua ukuran pokok, baik untuk tujuan analisis maupun untuk tujuan kuantitatif (Todaro, 1995) yaitu:

1. Distribusi pendapatan "personal" atau distribusi pendapatan berdasarkan ukuran atau besarnya pendapatan.

Distribusi pendapatan pribadi atau distribusi pendapatan berdasarkan besarnya pendapatan paling banyak digunakan ahli ekonomi. Distribusi ini hanya menyangkut orang per orang atau rumah tangga dan total pendapatan yang mereka terima, dari mana pendapatan yang mereka peroleh tidak dipersoalkan. Tidak dipersoalkan pula berapa banyak yang diperoleh masing-masing individu, apakah merupakan hasil dari pekerjaan mereka atau berasal dari sumber-sumber lain. Selain itu juga diabaikan sumber-sumber pendapatan yang menyangkut lokasi (apakah di wilayah desa atau kota) dan jenis pekerjaan.

2. Distribusi pendapatan "fungsional" atau distribusi pendapatan menurut bagian faktor distribusi.

Sistem distribusi ini mempertimbangkan individu-individu sebagai totalitas yang terpisah-pisah. Menurut Ahluwalia (1997) dalam Pramono (1999) dalam *“Income Inequality : Some Dimension Of The Problem”* mengenai keadaan distribusi pendapatan di beberapa Negara dapat digambarkan dalam 2 (dua) hal yaitu:

a. Adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan dan golongan ini didasarkan pada besar pendapatan yang mereka terima. Ahluwalia menggolongkan penduduk penerima pendapatan :

1. 40 persen penduduk menerima pendapatan paling rendah
2. 40 persen penduduk menerima pendapatan menengah
3. 20 persen penduduk menerima pendapatan paling tinggi

b. Distribusi pendapatan mutlak

Adalah persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari padanya. Ukuran umum yang dipakai biasanya adalah kriteria Bank Dunia yaitu ketidakmerataan tertinggi bila 40 persen penduduk dengan distribusi pendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan sedang apabila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12-17 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan rendah bila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari seluruh pendapatan nasional.

2.3.1. Kurva Lorenz

Cara lain untuk menganalisis distribusi pendapatan perorangan adalah membuat kurva yang disebut kurva Lorenz. Dinamakan kurva Lorenz adalah karena yang memperkenalkan kurva tersebut adalah Conrad Lorenz seorang ahli statistik dari Amerika Serikat. Pada tahun 1905 ia menggambarkan hubungan antara kelompok-kelompok penduduk dan pangsa (*share*) pendapatan mereka.

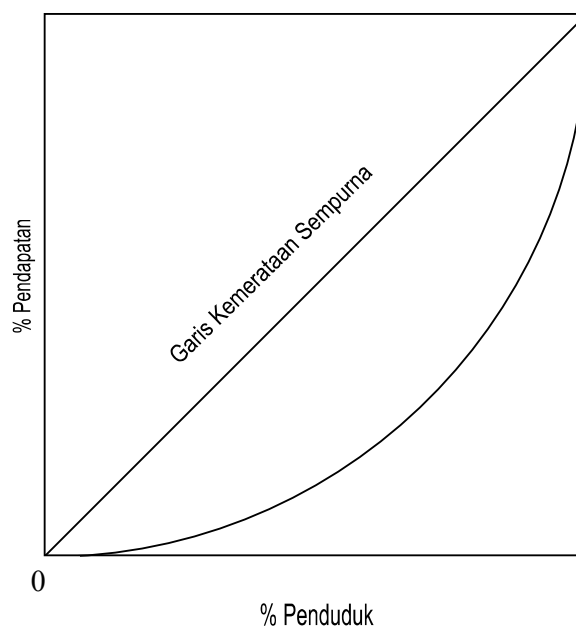
Gambar 2.3 menunjukkan bagaimana cara membuat kurva Lorenz tersebut. Jumlah pendapatan digambarkan pada sumbu horizontal, tidak dalam angka mutlak tetapi dalam persentase kumulatif. Misalnya, titik 20 menunjukkan 20 persen penduduk termiskin (paling rendah pendapatannya), dan pada titik 60 menunjukkan 60 persen penduduk terbawah pendapatannya, dan pada ujung sumbu horizontal merupakan jumlah 100 persen penduduk yang dihitung pendapatannya.

Sumbu vertikal menunjukkan pangsa pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah penduduk. Jumlah ini juga kumulatif sampai 100 persen, dengan demikian kedua sumbu itu sama panjangnya dan akhirnya membentuk bujur sangkar.

Sebuah garis diagonal kemudian digambarkan melalui titik origin menuju sudut kanan atas dari bujur sangkar tersebut. Setiap titik pada garis diagonal tersebut menunjukkan bahwa persentase pendapatan yang diterima sama persis dengan persentase penerima pendapatan tersebut. Sebagai contoh, titik tengah dari diagonal tersebut betul-betul menunjukkan

bahwa 50 persen pendapatan diterima oleh 50 persen jumlah penduduk. Demikian juga titik 75 atau 25. Dengan kata lain, garis diagonal tersebut menunjukkan distribusi pendapatan dalam keadaan pemerataan sempurna (*perfect equality*). Oleh karena itu garis tersebut bias juga disebut sebagai garis pemerataan sempurna.

Gambar 2.3
Kurva Lorenz

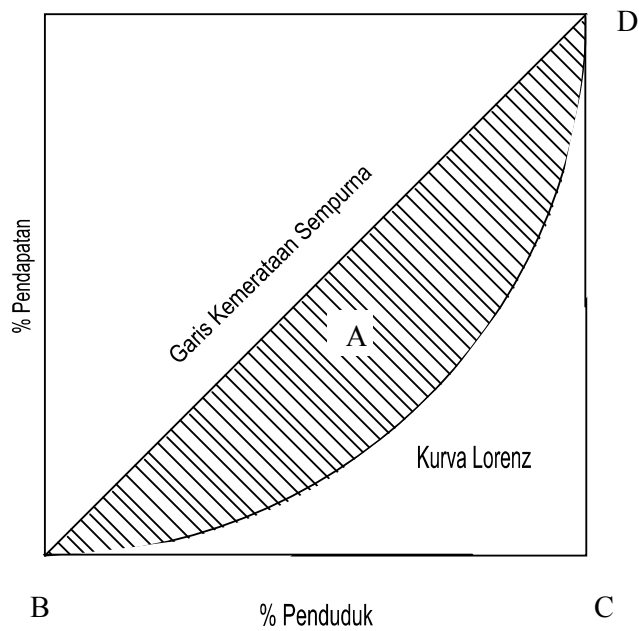


Semakin jauh kurva Lorenz tersebut dari garis diagonal (pemerataan sempurna), semakin tinggi derajat *ketidakmerataan* yang ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim dari *ketidakmerataan* sempurna, misalnya keadaan dimana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, akan ditunjukkan oleh berhimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan.

2.3.2. Koefisien Gini

Suatu ukuran yang singkat mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara biasa diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal (kemerataan sempurna) dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar dimana terdapat kurva Lorenz tersebut. Gambar-5 koefisien Gini itu ditunjukkan oleh perbandingan antara daerah yang diarsir A dengan luas segitiga BCD.

Gambar 2.4
Perkiraan Koefisien Gini



$$\text{Koef. Gini} = \frac{\text{Daerah Arsir A}}{\text{Luas } \triangle \text{BCD}}$$

Secara matematis rumus koefisien Gini adalah sebagai berikut:

$$KG = 1 - \sum_{i=1}^n (X_{i+1} - X_i)(Y_i + Y_{i+1})$$

Atau

$$KG = 1 - \sum_{i=1}^n f_i (Y_i + Y_{i+1})$$

Dimana :

KG = Angka Koefisien Gini

X_i = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i

f_i = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i

Y_i = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i

Koefisien Gini ini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna). Koefisien Gini dari negara-negara yang mengalami **ketidakmerataan tinggi** berkisar antara **0,50 – 0,70**; **ketidakmerataan sedang** berkisar antara **0,36 – 0,49**; dan yang mengalami ketidakmerataan rendah berkisar antara **0,20 - 0,35**.

2.3.3. Teori Distribusi Pendapatan Kaldor

Menurut Kaldor ada dua kelompok dalam masyarakat, yaitu kelompok kapitalis dan kelompok buruh. Masing-masing kelompok mempunyai *propensity to save* (s) yang berbeda : s_p untuk kelompok kapitalis dan s_w untuk kelompok buruh, dan kita anggap bahwa $s_p > s_w$ (sebenarnya

penentuan kelompok ini tidaklah harus antara golongan kapitalis dan buruh seperti yang dilakukan oleh Kaldor, tetapi bisa berdasarkan ciri-ciri sosio-ekonomis yang lain, misal : kelompok penduduk perkotaan dan kelompok penduduk pedesaan atau kelompok sektor industri dan kelompok sektor pertanian dan sebagainya). Yang penting adalah kedua kelompok tersebut mempunyai *propensity to save* yang berbeda.

Seluruh pendapatan nasional (Q) oleh ke dua kelompok tersebut pembagiannya

$$P + W = Q$$

Dimana : P = keuntungan atau penghasilan dari kelompok kapitalis

W = upah atau penghasilan dari kelompok buruh

Tabungan masyarakat total biasa dinyatakan sebagai :

$$S = s_p P + s_w W$$

Pesamaan tersebut kalau dibagi dengan Q, dan dengan mengingat bahwa W

$$= Q - P$$

Maka :

$$\frac{S}{Q} = s_p \frac{P}{Q} + s_w \frac{Q - P}{Q}$$

Atau

$$S = (s_p - s_w) \frac{P}{Q} + s_w Q$$

P/Q menunjukkan berapa bagian dari pendapatan masyarakat (pendapatan nasional) yang diterima oleh kelompok kapitalis, yang sering

disebut *profit share*. Jadi dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa *propensity to save* masyarakat secara keseluruhan (s) adalah kombinasi dari *propensity to save* dari masing-masing kelompok (s_p, s_w) dan *profit share* (yang menunjukkan pola distribusi pendapatan antar kedua kelompok tersebut). Syarat bagi *warranted of growth* adalah :

$$Sh = [(s_p - s_w) \frac{P}{Q} + s_w h]$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa meskipun h, s_p dan s_w adalah koefisien yang mempunyai nilai konstan, namun *warranted of growth* tidak hanya mempunyai satu nilai tapi berkisar antara $x\%$ dan $y\%$. Nilai dimana dalam batas-batas ini yang nantinya merupakan *warranted of growth* tergantung pada pola distribusi pendapatan yang berlaku, yang ditunjukkan oleh *profit share* (P/Q). *Warranted of Growth* biasa berkisar antara $s_w h$ (apabila $P/Q = 0$) dan $s_p h$ (apabila $P/Q = 1$).

Jadi dalam model Kaldor pola distribusi pendapatan mempunyai frekuensi terhadap laju pertumbuhan ekonomi apabila $s_p > s_w$, maka semakin besar *profit share* semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa semakin tidak merata pula distribusi pendapatan, semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi. Model kaldor menunjukkan akan adanya “*Trade off*” atau pilihan antara pertumbuhan GDP yang cepat tetapi dengan distribusi pendapatan yang timpang, atau pertumbuhan GDP yang lambat tetapi dengan distribusi pendapatan yang lebih merata.

2.4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan

Dari segi teori ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut (Puslitbang Ekobank, LIPI, 1994)

1. Teori Karl Mark (1787)

Mark berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahap awal pembangunan akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Kenaikan tingkat upah dari tenaga kerja selanjutnya berpengaruh terhadap kenaikan resiko kapital terhadap tenaga kerja sehingga terjadi penurunan terhadap permintaan tenaga kerja. Akibatnya timbul masalah pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Singkatnya, pertumbuhan ekonomi cenderung mengurangi masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan hanya pada tahap awal pembangunan, kemudian pada tahap selanjutnya akan terjadi sebaliknya.

2. Menurut Kuznets seorang ekonom klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara miskin pada awalnya cenderung menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidak merataan distribusi pendapatan. Namun bila negara-negara miskin tersebut sudah semakin maju, maka persoalan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan akan menurun (*an inverse U shaped patern*).

3. Para ekonom klasik (Roberti, 1974), Hayani dan Ruffan (1985), mengemukakan pertumbuhan ekonomi akan selalu cenderung mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan walaupun masih dalam tahap awal pertumbuhan. Bukti empiris dari pandangan ini berdasarkan

pengamatan di beberapa negara seperti Taiwan, Hongkong, Singapura, RRC. Kelompok Neo klasik sangat optimis bahwa pertumbuhan ekonomi pada prakteknya cenderung mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.

4. Neo Marxist menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi justru akan selalu menyebabkan melebarnya jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Hal ini terjadi karena adanya akumulasi modal dan kemajuan teknologi yang cenderung meningkatkan konsentrasi penguasaan sumberdaya dan kapital oleh para penguasa modal kelompok “elit” masyarakat. Sebaliknya nonpemilik modal akan tetap berada dalam keadaan kemiskinan.
5. Munculnya kontroversi mengenai ada atau tidaknya *trade off* antara ketidakmerataan dan pertumbuhan menurut Fields (1990) dalam Mudrajat Kuncoro (1997), tergantung dari jenis data yang digunakan, apakah *cross section*, *time series* atau menggunakan data mikro. Masing-masing akan menghasilkan perhitungan yang berbeda karena pendekatan yang dilakukan berbeda.

2.5. Penelitian Terdahulu

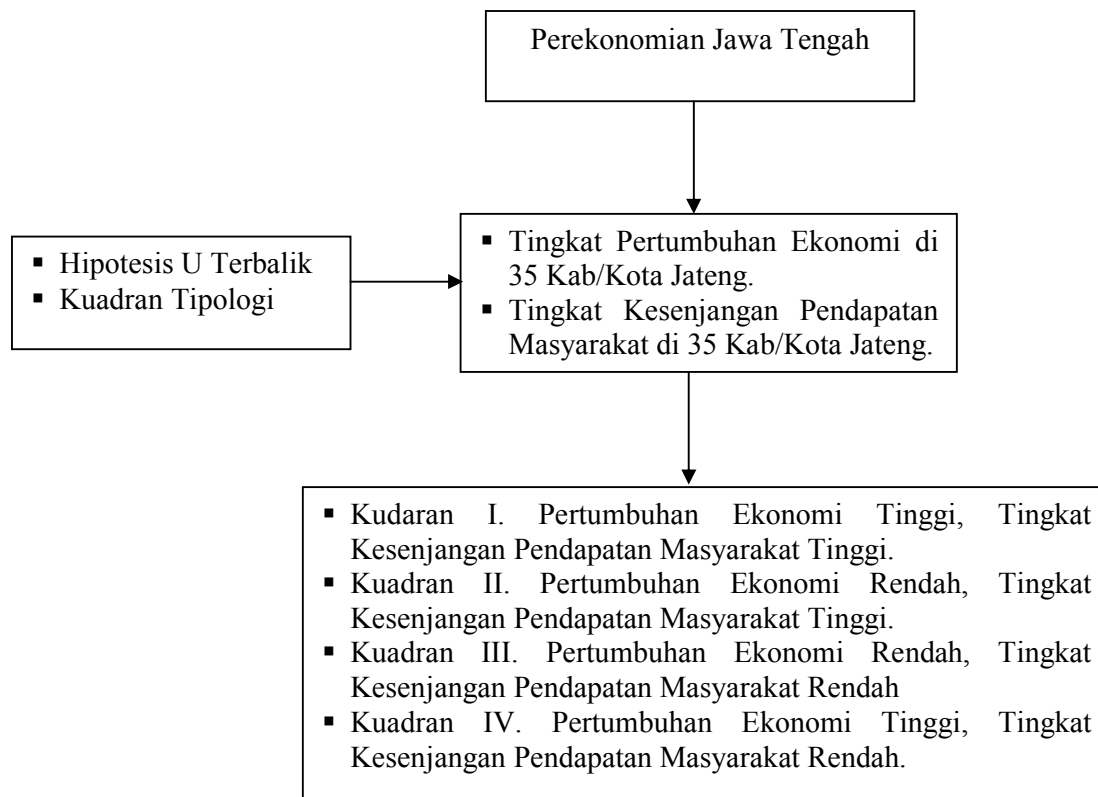
Penelitian atau studi yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan telah banyak dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut :

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil
1. Siswati Handayani (2004)	Laju Pertumbuhan Ekonomi Versus Pemerataan Pendapatan (studi kasus Kabupaten Semarang).	Tipologi Klasen, Indeks Williamson dan Korelasi Matriks	Dari hasil analisis Korelasi Matriks menunjukkan bahwa tidak terjadi trade off antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pendapatan wilayah di Kabupaten Semarang
2. Sapto Anggoro (2005)	Analisis Disparitas Pendapatan Dalam Kaitannya Dengan Pola Pertumbuhan Wilayah dan Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten Boyolali)	Indeks Williamson, Shift Share dan Tipologi Klassen	Dari analisis Tipologi Klassen di kabupaten Boyolali terdapat 5 Kecamatan yang termasuk wilayah maju, 8 Kecamatan yang termasuk wilayah berkembang, 3 Kecamatan termasuk wilayah lamban dan 3 Kecamatan termasuk wilayah kurang berkembang

2.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan tinjauan pustaka serta mengacu terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah apakah perekonomian daerah pada 35 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah memiliki pola seperti hipotesis yang diajukan Simom Kuznets bahwa antara tingkat pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan bersifat positif dengan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat.

Gambar 2.5.
Kerangka Pemikiran Teoritis



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian atau studi dilakukan untuk mengkaji suatu fenomena yang didasarkan atas teori yang relevan guna mengetahui kebenaran atas teori tersebut. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif dengan demikian jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan masyarakat. Adapun definisi dan parameter dari kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah laju kenaikan nilai PDRB pada tiap tahun yang terjadi di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Parameter yang digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi adalah prosentase.

2. Kesenjangan Pendapatan Masyarakat

Kesenjangan Pendapatan Masyarakat adalah perbedaan proporsi pendapatan antar kelompok masyarakat di perekonomian daerah 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat adalah angka indeks Gini Rasio.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diambil dari pihak lain atau merupakan data yang sudah diolah pihak kedua. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data PDRB Propinsi Jawa Tengah menurut harga konstan tahun 2000 - 2004.
2. Data PDRB 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menurut harga konstan tahun 2000 - 2004.
3. Data Pemerataan Pendapatan Jawa Tengah Tahun 2000 - 2004.
4. Data Pemerataan Pendapatan 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2000 - 2004.

3.4. Analisa Data

3.4.1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

$$Y = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100 \%$$

Dimana :

Y = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

PDRB_t = PDRB Kabupaten X Tahun t

PDRB_{t-1} = PDRB Kabupaten X Sebelum Tahun t

3.4.2. Indeks Gini Rasio

$$KG = 1 - \sum_{i=1}^n f_i (Y_{i+1} + Y_i)$$

Dimana :

KG = Angka Koefisien Gini

X_i = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i

f_i = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i

Y_i = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i

Koefisien Gini ini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna). Koefisien Gini dari negara-negara yang mengalami **ketidakmerataan tinggi** berkisar antara **0,50 – 0,70**; **ketidakmerataan sedang** berkisar antara **0,36 – 0,49**; dan yang mengalami ketidakmerataan rendah berkisar antara **0,20 - 0,35**.

3.4.3. Topologi Keterkaitan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kesenjangan Pendapatan Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pola perkembangan keterkaitan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat dalam periode waktu lima tahun. Karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif maka alat analisis data yang digunakan adalah dengan memanfaatkan alat analisis Tabel Kuadran Tipologi. Adapun Tabel Kuadran Tipologi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.1.
Tipologi Keterkaitan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
Dengan Tingkat Kesenjangan Pendapatan

Indek Gini Rasio Jawa Tengah		Y	X Nilai Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah
IV	I		
Wilayah Dengan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Atas Pertumbuhan Jawa Tengah. ▪ Tingkat Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Di Bawah Kesenjangan Jawa Tengah 	Wilayah Dengan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Atas Pertumbuhan Jawa Tengah. ▪ Tingkat Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Di Atas Kesenjangan Jawa Tengah 		
III	II		
Wilayah Dengan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Bawah Pertumbuhan Jawa Tengah. ▪ Tingkat Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Di Bawah Kesenjangan Jawa Tengah. 	Wilayah Dengan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Bawah Pertumbuhan Jawa Tengah. ▪ Tingkat Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Di Atas Kesenjangan Jawa Tengah 		

- Kuadran I adalah wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat kesenjangan pendapatan yang tinggi. Daerah di kuadran ini merupakan wilayah yang memiliki pola hubungan bersifat positif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat.

- Kuadran II adalah wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi rendah namun tingkat kesenjangan pendapatan tinggi. Daerah di kuadran ini memiliki pola hubungan bersifat negatif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan pendapatan.
- Kuadran III adalah wilayah yang pertumbuhannya rendah dan tingkat kesenjangan pendapatan juga rendah. Daerah di kuadran ini merupakan wilayah yang memiliki pola hubungan bersifat positif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat.
- Kuadran IV adalah wilayah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi tingkat kesenjangan pendapatan antar masyarakat rendah. Daerah di kuadran ini memiliki pola hubungan bersifat negatif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERTUMBUHAN EKONOMI & KESENJANGAN PENDAPATAN PENDUDUK DI 35 KABUPATEN/KOTA JAWA TENGAH

4.1. Kabupaten Cilacap

4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian daerah Kabupaten Cilacap selama periode tahun 2000-2004 secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

**Tabel 4.1. Perkembangan PDRB Kabupaten Cilacap
Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004**

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	15.717.136,30	-
2001	16.483.552,41	4,88
2002	17.963.441,66	8,98
2003	19.141.986,12	6,56
2004	20.458.739,20	6,88

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tabel di atas, tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Cilacap menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 15.717.136,3 juta, selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 16.483.552,41 juta atau meningkat sebesar 4,8 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Cilacap menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 17.963.441,66 juta atau mengalami peningkatan sebesar

8,9% bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Cilacap menurut harga konstan juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.19.141.986,12 juta atau meningkat sebesar 6,5 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Cilacap menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 20.458.739,20 juta atau meningkat sebesar 6,8 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000–2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 6,8 %.

4.1.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Cilacap pada periode 2000-2004 secara keseluruhan dapat dikategorikan rendah dan berfluktuatif. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Cilacap adalah sebesar 0,264, sedangkan tahun 2001 koefisien Gini adalah sebesar 0,204 namun pada tahun 2002 turun menjadi 0,203. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Cilacap meningkat menjadi 0,268 dan kemudian pada tahun 2004 turun menjadi 0,238.

Tabel 4.2. Gini Rasio Kabupaten Cilacap, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Perubahan
2000	0,264	-
2001	0,204	-0,060
2002	0,203	-0,205
2003	0,268	0,269
2004	0,238	-0,030

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.2. Kabupaten Banyumas

4.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000–2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Banyumas secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat di lihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.3. Perkembangan PDRB Kabupaten Banyumas Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	2.631.204,78	-
2001	2.689.576,57	2,218
2002	2.777.618,98	3,273
2003	2.910.478,40	4,783
2004	3.027.430,24	4,018

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Banyumas menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.631.204,78 juta, selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 2.689.576,57 juta atau meningkat sebesar 2,2 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Banyumas menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.777.618,98 juta atau mengalami peningkatan sebesar 3,2 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Banyumas menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 2.910.478,40 juta atau meningkat sebesar

4,7 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Banyumas menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 3.027.430,24 juta atau meningkat sebesar 4,0 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000–2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 3,6 %.

4.2.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Banyumas pada periode 2000-2004 secara keseluruhan dapat dikategorikan rendah dan berfluktuatif. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Banyumas adalah sebesar 0,283 dan pada tahun 2001 turun menjadi 0,258, sedangkan pada tahun 2002 turun lagi menjadi 0,221. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Banyumas meningkat menjadi 0,273 dan kemudian pada tahun 2004 juga meningkat menjadi 0,279.

Tabel 4.4. Gini Rasio Kabupaten Banyumas, Tahun 1999 - 2003

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Perubahan
2000	0,283	-
2001	0,258	-0,025
2002	0,221	-0,038
2003	0,273	0,052
2004	0,279	0,006

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.3. Kabupaten Purbalingga

4.3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000-2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Purbalingga secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat di lihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.5. Perkembangan PDRB Kabupaten Purbalingga Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	1.442.648,28	-
2001	1.485.366,85	2,961
2002	1.533.382,46	3,233
2003	1.601.791,87	4,461
2004	1.665.738,78	3,992

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Purbalingga menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 1.442.648,28 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 1.485.366,85 juta atau meningkat sebesar 2,9 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Purbalingga menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 1.533.382,46 juta atau mengalami peningkatan sebesar 3,2 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Purbalingga menurut harga konstan juga mengalami

pertambahan menjadi sebesar Rp. 1.601.791,87 juta atau meningkat sebesar 4,4 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Purbalingga menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 1.665.738,78 juta atau meningkat sebesar 3,9 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000 –2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 3,7 %.

4.3.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Purbalingga pada periode 2000-2004 secara keseluruhan dapat dikategorikan rendah dan berfluktuatif. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Purbalingga adalah sebesar 0,208 sedangkan pada tahun 2001 meningkat menjadi 0,232 namun pada tahun 2002 turun menjadi 0,215. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Purbalingga meningkat menjadi 0,247 dan kemudian pada tahun 2004 meningkat lagi menjadi 0,250.

Tabel 4.6. Gini Rasio Kabupaten Purbalingga, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Perubahan
2000	0,208	-
2001	0,232	0,024
2002	0,215	-0,017
2003	0,247	0,032
2004	0,250	0,003

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.4. Kabupaten Banjarnegara

4.4.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000-2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Banjarnegara secara keseluruhan mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2000 nilai PDRBnya adalah sebesar Rp. 2.050.250,56 juta, pada tahun 2004 bertambah menjadi adalah sebesar Rp. 2.209.396,76 juta.

Tabel 4.7. Perkembangan PDRB Kabupaten Banjarnegara Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	2.050.250,56	-
2001	2.047.937,66	-0,113
2002	2.067.306,33	0,946
2003	2.128.162,84	2,944
2004	2.209.396,76	3,817

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Penurunan terjadi pada tahun 2001 yakni sebesar -0,1% bila dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun tahun lainnya nilai PDRB nya selalu mengalami pertumbuhan yang positif. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000–2004 laju pertumbuhan rata-rata PDRB Kabupaten Banjarnegara pada tiap tahun adalah sebesar 1,9 %.

4.4.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Banjarnegara secara keseluruhan pada periode 2000-2004 dapat dikategorikan rendah dan berfluktuatif. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Banjarnegara adalah sebesar 0,201 sedangkan pada tahun 2001 meningkat menjadi 0,214 namun pada tahun 2002 turun menjadi 0,184. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Banjarnegara meningkat menjadi 0,206 dan kemudian pada tahun 2004 meningkat lagi menjadi 0,231.

Tabel 4.8. Gini Rasio Kabupaten Banjarnegara, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Perubahan
2000	0,201	-
2001	0,214	0,013
2002	0,184	-0,030
2003	0,206	0,022
2004	0,231	0,026

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.5. Kabupaten Kebumen

4.5.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000-2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Kebumen secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.9. Perkembangan PDRB Kabupaten Kebumen Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	1.942.942,44	-
2001	1.961.243,93	0,942
2002	2.024.773,91	3,239
2003	2.099.743,13	3,703
2004	2.141.060,04	1,968

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Kebumen menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 1.942.942,44 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 1.961.243,93 juta atau meningkat sebesar 0,9 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Kebumen adalah sebesar Rp. 2.024.773,91 juta atau mengalami peningkatan sebesar 3,2 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 2.099.743,13 juta atau meningkat sebesar 3,7 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB

Kabupaten Kebumen menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.141.060,04 juta atau meningkat sebesar 1,9 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000-2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 2,5 %.

4.5.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Kebumen pada periode 2000-2004 dapat dikategorikan rendah namun cenderung meningkat. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Kebumen adalah sebesar 0,192 sedangkan pada tahun 2001 meningkat menjadi 0,210 serta pada tahun 2002 juga meningkat lagi menjadi 0,225. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Kebumen meningkat menjadi 0,229 dan kemudian pada tahun 2004 meningkat lagi menjadi 0,243.

Tabel 4.10. Gini Rasio Kabupaten Kebumen, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,192	-
2001	0,210	0,018
2002	0,225	0,014
2003	0,229	0,004
2004	0,243	0,015

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.6. Kabupaten Purworejo

4.6.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000-2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Purworejo secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.11. Perkembangan PDRB Kabupaten Purworejo Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	1.888.481,58	-
2001	1.955.370,81	3,542
2002	2.022.743,18	3,446
2003	2.125.411,34	5,076
2004	2.214.137,30	4,175

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Purworejo menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 1.888.481,58 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 1.955.370,81 juta atau meningkat sebesar 3,5 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Purworejo menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.022.743,18 juta atau mengalami peningkatan sebesar 3,4 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Purworejo menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 2.125.411,34 juta atau meningkat sebesar

5,0 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Purworejo menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.214.137,30 juta atau meningkat sebesar 4,1 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000–2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 4,1 %.

4.6.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Purworejo pada periode 2000-2004 dapat dikategorikan rendah tetapi cenderung untuk meningkat. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Purworejo adalah sebesar 0,217 namun pada tahun 2001 turun menjadi 0,202, dan pada tahun 2002 meningkat lagi menjadi 0,244. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Purworejo meningkat menjadi 0,278 dan kemudian pada tahun 2004 meningkat lagi menjadi 0,212.

Tabel 4.12. Gini Rasio Kabupaten Purworejo, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,217	-
2001	0,202	-0,015
2002	0,244	0,042
2003	0,278	0,034
2004	0,212	-0,066

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.7. Kabupaten Wonosobo

4.7.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000-2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Wonosobo secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.13. Perkembangan PDRB Kabupaten Wonosobo Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	1.361.232,63	-
2001	1.374.944,18	1,007
2002	1.402.298,93	1,990
2003	1.434.155,24	2,272
2004	1.466.975,04	2,288

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Wonosobo menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 1.361.232,63 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 1.374.944,18 juta atau meningkat sebesar 1,0 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Wonosobo menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 1.402.298,93 juta atau mengalami peningkatan sebesar 1,9 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Wonosobo menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 1.434.155,24 juta atau meningkat sebesar

2,2 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Wonosobo menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 1.466.975,04 juta atau meningkat sebesar 2,2 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000– 2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 1,9 %.

4.7.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Wonosobo pada periode 2000-2004 dapat dikatakan rendah tetapi cenderung meningkat. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Wonosobo adalah sebesar 0,193 dan pada tahun 2001 meningkat menjadi 0,209 serta pada tahun 2002 juga meningkat lagi menjadi 0,238. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Wonosobo meningkat menjadi 0,241 dan kemudian pada tahun 2004 meningkat lagi menjadi 0,256.

Tabel 4.14. Gini Rasio Kabupaten Wonosobo, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,193	-
2001	0,209	0,017
2002	0,238	0,029
2003	0,241	0,003
2004	0,256	0,016

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.8. Kabupaten Magelang

4.8.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000-2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Magelang secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.15. Perkembangan PDRB Kabupaten Magelang Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	2.660.660,50	-
2001	2.732.031,39	2,682
2002	2.857.339,03	4,587
2003	2.992.408,18	4,727
2004	3.120.318,77	4,275

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Magelang menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.660.660,50 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 2.732.031,39 juta atau meningkat sebesar 2,6 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Magelang menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.857.339,03 juta atau mengalami peningkatan sebesar 4,5 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Magelang menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 2.992.408,18 juta atau meningkat sebesar

4,7 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Magelang menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 3.120.318,77 juta atau meningkat sebesar 4,2 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000–2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 4,1 %.

4.8.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Magelang pada periode 2000-2004 rendah dan cenderung meningkat. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Magelang adalah sebesar 0,234 namun pada tahun 2001 turun menjadi 0,190 sedangkan pada tahun 2002 meningkat menjadi sebesar 0,213. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Magelang meningkat menjadi 0,260 dan kemudian pada tahun 2004 meningkat lagi menjadi 0,223.

Tabel 4.16. Gini Rasio Kabupaten Magelang, 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,234	-
2001	0,190	-0,044
2002	0,213	0,022
2003	0,260	0,048
2004	0,223	-0,038

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.9. Kabupaten Boyolali

4.9.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000-2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Boyolali secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.17. Perkembangan PDRB Kabupaten Boyolali Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	2.807.307,11	-
2001	2.984.958,46	6,328
2002	3.062.387,87	2,594
2003	3.211.153,33	4,858
2004	3.276.631,03	2,039

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Boyolali menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.807.307,11 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 2.984.958,46 juta atau meningkat sebesar 6,3 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Boyolali menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 3.062.387,87 juta atau mengalami peningkatan sebesar 2,5 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Boyolali menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 3.211.153,33 juta atau meningkat sebesar

4,8 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Boyolali menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 3.276.631,03 juta atau meningkat sebesar 2,0 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000–2004 laju pertumbuhan rata-rata PDRB Kabupaten Boyolali menurut harga konstan pada tiap tahunnya adalah sebesar 4,0 %.

4.9.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Boyolali pada periode 2000-2004 rendah dan cenderung meningkat. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Boyolali adalah sebesar 0,234 sedangkan pada tahun 2001 turun menjadi 0,232 kemudian pada tahun 2002 turun lagi menjadi 0,227. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Boyolali turun menjadi 0,224 dan kemudian pada tahun 2004 meningkat lagi menjadi 0,226.

Tabel 4.18. Gini Rasio Kabupaten Boyolali, 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,234	
2001	0,232	-0,002
2002	0,227	-0,005
2003	0,224	-0,003
2004	0,226	0,001

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.10. Kabupaten Klaten

4.10.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000-2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Klaten secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.19. Perkembangan PDRB Kabupaten Klaten Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	3.137.340,11	-
2001	3.267.192,67	4,139
2002	3.394.958,24	3,911
2003	3.561.706,27	4,912
2004	3.737.993,75	4,950

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Klaten menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 3.137.340,11 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 3.267.192,67 juta atau meningkat sebesar 4,1 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Klaten menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 3.394.958,24 juta atau mengalami peningkatan sebesar 3,9 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Klaten menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 3.561.706,27 juta atau meningkat sebesar

4,9 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Klaten menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 3.737.993,75 juta atau meningkat sebesar 4,9 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000 – 2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 4,5 %.

4.10.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Klaten pada periode 2000-2004 dapat dikatakan rendah tetapi cenderung untuk meningkat. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Klaten adalah sebesar 0,232 namun pada tahun 2001 turun menjadi 0,206 kemudian pada tahun 2002 meningkat lagi menjadi 0,239. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Klaten meningkat menjadi 0,259 dan kemudian pada tahun 2004 meningkat lagi menjadi 0,267.

Tabel 4.20. Gini Rasio Kabupaten Klaten, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,232	-
2001	0,206	-0,026
2002	0,239	0,033
2003	0,259	0,020
2004	0,267	0,008

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.11. Kabupaten Sukoharjo

4.11.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000–2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.21. Perkembangan PDRB Kabupaten Sukoharjo Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	2.816.105,23	-
2001	2.934.260,08	4,196
2002	3.024.685,37	3,082
2003	3.149.995,63	4,143
2004	3.285.604,57	4,305

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Sukoharjo menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.816.105,23 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 2.934.260,08 juta atau meningkat sebesar 4,1 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Sukoharjo menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 3.024.685,37 juta atau mengalami peningkatan sebesar 3,0 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Sukoharjo menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 3.149.995,63 juta atau meningkat sebesar

4,1 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Sukoharjo menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 3.285.604,57 juta atau meningkat sebesar 4,3 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000–2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 3,9 %.

4.11.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Sukoharjo pada periode 2000-2004 rendah dan cenderung meningkat. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Sukoharjo adalah sebesar 0,237 kemudian pada tahun 2001 meningkat menjadi 0,310 sedangkan pada tahun 2002 menurun menjadi 0,239. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Sukoharjo meningkat menjadi 0,255 dan kemudian pada tahun 2004 menurun lagi menjadi 0,218.

Tabel 4.22. Gini Rasio Kabupaten Sukoharjo, Tahun 2000 – 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,237	-
2001	0,310	0,073
2002	0,239	-0,070
2003	0,255	0,015
2004	0,218	-0,037

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.12. Kabupaten Wonogiri

4.12.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000–2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Wonogiri secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.23. Perkembangan PDRB Kabupaten Wonogiri Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	2.187.596,84	-
2001	2.214.250,68	1,218
2002	2.294.457,71	3,622
2003	2.333.137,65	1,686
2004	2.410.433,62	3,313

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Wonogiri menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.187.596,84 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 2.214.250,68 juta atau meningkat sebesar 1,2 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Wonogiri menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.294.457,71 juta atau mengalami peningkatan sebesar 3,6 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Wonogiri menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 2.333.137,65 juta atau meningkat sebesar

1,6 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Wonogiri menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.410.433,62 juta atau meningkat sebesar 3,3 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000 – 2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 2,5 %.

4.12.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Wonogiri pada periode 2000-2004 dapat dikategorikan rendah tetapi cenderung meningkat. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Wonogiri adalah sebesar 0,239 namun pada tahun 2001 turun menjadi 0,204 sedangkan pada tahun 2002 meningkat menjadi 0,231. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Wonogiri turun menjadi 0,229 dan kemudian pada tahun 2003 menurun lagi menjadi 0,222.

Tabel 4.24. Gini Rasio Kabupaten Wonogiri, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,239	-
2001	0,204	-0,035
2002	0,231	0,027
2003	0,229	-0,002
2004	0,222	-0,007

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.13. Kabupaten Karanganyar

4.13.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000–2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.25. Perkembangan PDRB Kabupaten Karanganyar Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	3.231.726,10	-
2001	3.190.291,22	-1,282
2002	3.333.969,22	4,504
2003	3.522.989,78	5,670
2004	3.762.025,48	6,785

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Karanganyar menurut harga konstan adalah sebesar Rp3.231.726,10 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 3.190.291,22 juta atau meningkat sebesar -1,2 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Karanganyar menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 3.333.969,22 juta atau mengalami peningkatan sebesar 4,5 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Karanganyar menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 3.522.989,78 juta atau

meningkat sebesar 5,6 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Karanganyar menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 3.762.025,48 juta atau meningkat sebesar 6,7 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000 – 2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 3,9 %.

4.13.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Karanganyar pada periode 2000-2004 rendah dan cenderung meningkat, Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Karanganyar adalah sebesar 0,227 kemudian pada tahun 2001 meningkat menjadi 0,234 dan pada tahun 2002 meningkat lagi menjadi 0,322. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Karanganyar menurun menjadi 0,253 dan kemudian pada tahun 2004 menurun lagi menjadi 0,240.

Tabel 4.26. Gini Rasio Kabupaten Karanganyar, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,227	-
2001	0,234	0,006
2002	0,322	0,089
2003	0,253	-0,069
2004	0,240	-0,013

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.14. Kabupaten Sragen

4.14.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000–2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Sragen secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.27. Perkembangan PDRB Kabupaten Sragen Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	1.931.241,66	-
2001	1.988.134,03	2,946
2002	2.035.584,82	2,387
2003	2.109.239,17	3,618
2004	2.206.330,95	4,603

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Sragen menurut harga konstan adalah sebesar Rp 1.931.241,66 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 1.988.134,03 juta atau meningkat sebesar 2,9 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Sragen menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.035.584,82 juta atau mengalami peningkatan sebesar 2,3 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Sragen menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 2.109.239,17 juta atau meningkat

sebesar 3,6 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Sragen menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.206.330,95 juta atau meningkat sebesar 4,6 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000 – 2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 3,4 %.

4.14.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Sragen pada periode 2000-2004 dapat digolongkan rendah tetapi cenderung meningkat. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Sragen adalah sebesar 0,254 kemudian pada tahun 2001 meningkat menjadi 0,275 namun pada tahun 2002 turun menjadi 0,232. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Sragen meningkat menjadi 0,262 dan kemudian pada tahun 2004 menurun lagi menjadi 0,259.

Tabel 4.28. Gini Rasio Kabupaten Sragen, Tahun 2000-2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,254	-
2001	0,275	0,021
2002	0,232	-0,043
2003	0,262	0,030
2004	0,259	-0,003

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.15. Kabupaten Grobogan

4.15.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000–2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Grobogan secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.29. Perkembangan PDRB Kabupaten Grobogan Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	1.881.992,44	-
2001	1.960.212,12	4,156
2002	2.024.043,72	3,256
2003	2.115.140,05	4,501
2004	2.190.405,94	3,558

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Grobogan menurut harga konstan adalah sebesar Rp 1.881.992,44 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 1.960.212,12 juta atau meningkat sebesar 4,1 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Grobogan menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.024.043,72 juta atau mengalami peningkatan sebesar 3,2 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Grobogan menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 2.115.140,05 juta atau meningkat sebesar

4,5 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Grobogan menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.190.405,94 juta atau meningkat sebesar 3,5 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000 – 2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 3,9 %.

4.15.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Grobogan pada periode 2000-2004 dapat digolongkan rendah tetapi cenderung untuk meningkat. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Grobogan adalah sebesar 0,254 namun pada tahun 2001 turun menjadi 0,196 sedangkan pada tahun 2002 meningkat lagi menjadi 0,217. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Grobogan meningkat menjadi 0,224 dan kemudian pada tahun 2004 meningkat lagi menjadi 0,232.

Tabel 4.30. Gini Rasio Kabupaten Grobogan, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,254	-
2001	0,196	-0,057
2002	0,217	0,021
2003	0,224	0,007
2004	0,232	0,007

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.16. Kabupaten Blora

4.16.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000–2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Blora secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.31. Perkembangan PDRB Kabupaten Blora Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	1.619.246,24	-
2001	1.666.103,53	2,894
2002	1.706.776,14	2,441
2003	1.789.417,51	4,842
2004	1.869.108,39	4,453

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Blora menurut harga konstan adalah sebesar Rp 1.619.246,24 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 1.960.212,12 juta atau meningkat sebesar 2,8 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Blora menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 1.706.776,14 juta atau mengalami peningkatan sebesar 2,4 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Blora menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 1.789.417,51 juta atau meningkat sebesar

4,8 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Blora menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 1.869.108,39 juta atau meningkat sebesar 4,4 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000 – 2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 3,7 %.

4.16.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Blora pada periode 2000-2004 dapat digolongkan rendah tetapi cenderung meningkat. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Blora adalah sebesar 0,222 namun pada tahun 2001 turun menjadi 0,198 sedangkan pada tahun 2002 meningkat lagi menjadi 0,227. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Blora meningkat menjadi 0,230 dan kemudian pada tahun 2004 meningkat lagi menjadi 0,191.

Tabel 4.32. Gini Rasio Kabupaten Blora, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,222	-
2001	0,198	-0,024
2002	0,227	0,029
2003	0,230	0,003
2004	0,191	-0,040

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.17. Kabupaten Rembang

4.17.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000–2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Rembang secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.33. Perkembangan PDRB Kabupaten Rembang Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	1.355.597,85	-
2001	1.398.058,75	3,132
2002	1.479.081,95	5,795
2003	1.525.177,35	3,116
2004	1.584.428,68	3,885

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Rembang menurut harga konstan adalah sebesar Rp 1.355.597,85 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 1.398.058,75 juta atau meningkat sebesar 3,1 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Rembang menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 1.479.081,95 juta atau mengalami peningkatan sebesar 5,7 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Rembang menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 1.525.177,35 juta atau meningkat sebesar

3,1 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Rembang menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 1.584.428,68 juta atau meningkat sebesar 3,8 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000 – 2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 4,0 %.

4.17.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Rembang pada periode 2000-2004 dapat digolongkan rendah tetapi cenderung meningkat. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Rembang adalah sebesar 0,238 namun pada tahun 2001 turun menjadi 0,210 sedangkan pada tahun 2002 meningkat menjadi 0,249. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Rembang menurun lagi menjadi 0,234 dan kemudian pada tahun 2004 menurun lagi menjadi 0,177.

Tabel 4.34. Gini Rasio Kabupaten Rembang, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,238	-
2001	0,210	-0,028
2002	0,249	0,039
2003	0,234	-0,014
2004	0,177	-0,058

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.18. Kabupaten Pati

4.18.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000–2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Pati secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.35. Perkembangan PDRB Kabupaten Pati Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.0000)	Pertumbuhan (%)
2000	2.935.497,05	-
2001	3.051.143,43	3,940
2002	3.136.064,75	2,783
2003	3.202.772,29	2,127
2004	3.334.916,06	4,126

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Pati menurut harga konstan adalah sebesar Rp 2.935.497,05 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 3.051.143,43 juta atau meningkat sebesar 3,9 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Pati menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 3.136.064,75 juta atau mengalami peningkatan sebesar 2,7 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Pati menurut harga konstan juga mengalami penambahan

menjadi sebesar Rp. 3.202.772,29 juta atau meningkat sebesar 2,1 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Pati menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 3.334.916,06 juta atau meningkat sebesar 4,1 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000 – 2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 3,2 %.

4.18.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Pati pada periode 2000-2004 dapat dikatakan rendah tetapi cenderung untuk meningkat. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Pati adalah sebesar 0,208 namun pada tahun 2001 turun menjadi 0,205 dan pada tahun 2002 menurun lagi menjadi 0,185. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Pati menurun menjadi 0,174 dan kemudian pada tahun 2004 meningkat lagi menjadi 0,184.

Tabel 4.36. Gini Rasio Kabupaten Pati, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,208	-
2001	0,205	-0,004
2002	0,185	-0,019
2003	0,174	-0,012
2004	0,184	0,011

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.19. Kabupaten Kudus

4.19.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000–2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Kudus secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.37. Perkembangan PDRB Kabupaten Kudus Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	7.561.441,64	-
2001	7.854.876,91	3,881
2002	8.048.850,61	2,469
2003	8.148.393,30	1,237
2004	8.449.294,34	3,693

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Kudus menurut harga konstan adalah sebesar Rp 7.561.441,64 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 7.854.876,91 juta atau meningkat sebesar 3,8 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Kudus menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 8.048.850,61 juta atau mengalami peningkatan sebesar 2,4 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Kudus menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 8.148.393,30 juta atau meningkat sebesar

1,2 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Kudus menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 8.449.294,34 juta atau meningkat sebesar 3,6 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000 – 2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 2,8 %.

4.19.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Kudus pada periode 2000-2004 dapat dikatakan rendah dan cenderung meningkat. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Kudus adalah sebesar 0,191 kemudian tahun 2001 meningkat menjadi 0,195 dan pada tahun 2002 meningkat lagi menjadi 0,224. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Kudus menurun menjadi 0,210 dan kemudian pada tahun 2004 menurun lagi menjadi 0,199.

Tabel 4.38. Gini Rasio Kabupaten Kudus, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,191	-
2001	0,195	0,004
2002	0,224	0,029
2003	0,210	-0,014
2004	0,199	-0,011

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.20. Kabupaten Jepara

4.20.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000–2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Jepara secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.39. Perkembangan PDRB Kabupaten Jepara Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	2.788.494,20	-
2001	2.877.653,63	3,197
2002	2.990.539,39	3,923
2003	3.105.547,29	3,846
2004	3.222.872,00	3,778

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Jepara menurut harga konstan adalah sebesar Rp 2.788.494,20 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 2.877.653,63 juta atau meningkat sebesar 3,1 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Jepara menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.990.539,39 juta atau mengalami peningkatan sebesar 3,9 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Jepara menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 3.105.547,29 juta atau meningkat sebesar

3,8 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Jepara menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 3.222.872,00 juta atau meningkat sebesar 3,7 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000 – 2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 3,7 %.

4.20.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Jepara pada periode 2000-2004 dapat dikatakan rendah dan cenderung meningkat. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Jepara adalah sebesar 0,269 namun pada tahun 2001 menurun menjadi 0,184 sedangkan pada tahun 2002 meningkat lagi menjadi 0,219. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Jepara nilainya masih sama dengan nilai tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,219 namun pada tahun 2004 mengalami penurunan lagi menjadi 0,218.

Tabel 4.40. Gini Rasio Kabupaten Jepara, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,269	-
2001	0,184	-0,085
2002	0,219	0,035
2003	0,219	0,001
2004	0,218	-0,001

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.21. Kabupaten Demak

4.21.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000–2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Demak secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.41. Perkembangan PDRB Kabupaten Demak Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	2.273.639,17	-
2001	2.358.227,95	3,720
2002	2.421.373,11	2,678
2003	2.490.413,75	2,851
2004	2.575.194,94	3,404

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Demak menurut harga konstan adalah sebesar Rp 2.273.639,17 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 2.358.227,95 juta atau meningkat sebesar 3,7 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Demak menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.421.373,11 juta atau mengalami peningkatan sebesar 2,6 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Demak menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 2.490.413,75 juta atau meningkat sebesar

2,8 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Demak menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.575.194,94 juta atau meningkat sebesar 3,4 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000– 004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 3,2 %.

4.21.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Demak pada periode 2000-2004 dapat dikatakan rendah dan cenderung meningkat. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Demak adalah sebesar 0,190 kemudian pada tahun 2001 meningkat menjadi 0,193 dan pada tahun 2002 meningkat lagi menjadi 0,200. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Demak meningkat menjadi 0,290 namun pada tahun 2004 menurun lagi menjadi 0,238.

Tabel 4.42. Gini Rasio Kabupaten Demak, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,190	-
2001	0,193	0,003
2002	0,200	0,007
2003	0,290	0,090
2004	0,238	-0,052

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.22. Kabupaten Semarang

4.22.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000–2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Semarang secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.43. Perkembangan PDRB Kabupaten Semarang Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	3.317.784,74	-
2001	3.406.953,16	2,688
2002	3.773.972,68	10,773
2003	3.662.184,24	-2,962
2004	3.703.506,75	1,128

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Semarang menurut harga konstan adalah sebesar Rp 3.317.784,74 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 3.406.953,16 juta atau meningkat sebesar 2,6 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Semarang menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 3.773.972,68 juta atau mengalami peningkatan sebesar 10,7 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Semarang menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 3.662.184,24 juta atau meningkat sebesar

-2,9 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Semarang menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 3.703.506,75 juta atau meningkat sebesar 1,1 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000 – 2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 2,9 %.

4.22.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Semarang pada periode 2000-2004 rendah dan cenderung meningkat. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Semarang adalah sebesar 0,246 namun pada tahun 2001 menurun menjadi 0,193 kemudian pada tahun 2002 meningkat menjadi 0,227. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Semarang meningkat menjadi 0,272 namun pada tahun 2004 menurun lagi menjadi 0,223.

Tabel 4.44. Gini Rasio Kabupaten Semarang, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertumbuhan
2000	0,246	-
2001	0,203	-0,043
2002	0,227	0,024
2003	0,272	0,046
2004	0,223	-0,049

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.23. Kabupaten Temanggung

4.23.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000–2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Temanggung secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.45. Perkembangan PDRB Kabupaten Temanggung Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	1.837.339,92	-
2001	1.837.339,92	3,193
2002	1.899.507,75	3,384
2003	1.985.295,00	4,516
2004	2.058.605,42	3,693

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Temanggung menurut harga konstan adalah sebesar Rp 1.837.339,92 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 1.837.339,92 juta atau meningkat sebesar 3,1 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Temanggung menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 1.899.507,75 juta atau mengalami peningkatan sebesar 3,3 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Temanggung menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 1.985.295,00 juta atau

meningkat sebesar 4,5 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Temanggung menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.058.605,42 juta atau meningkat sebesar 3,6 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000 – 2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 3,7 %.

4.23.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Temanggung pada periode 2000-2004 dapat dikatakan rendah dan cenderung meningkat. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Temanggung adalah sebesar 0,219 kemudian pada tahun 2001 meningkat menjadi 0,267 dan pada tahun 2002 meningkat lagi menjadi 0,319. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Temanggung menurun menjadi 0,270 kemudian pada tahun 2004 menurun lagi menjadi 0,233.

Tabel 4.46. Gini Rasio Kabupaten Temanggung, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,219	-
2001	0,267	0,047
2002	0,319	0,052
2003	0,270	-0,049
2004	0,233	-0,037

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.24. Kabupaten Kendal

4.24.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000–2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Kendal secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.47. Perkembangan PDRB Kabupaten Kendal Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	3.635.106,15	-
2001	3.757.954,62	3,380
2002	3.879.300,82	3,229
2003	3.992.277,82	2,912
2004	4.104.226,89	2,804

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Kendal menurut harga konstan adalah sebesar Rp 3.635.106,15 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 3.757.954,62 juta atau meningkat sebesar 3,3 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Kendal menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 3.879.300,82 juta atau mengalami peningkatan sebesar 3,2 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Kendal menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 3.992.277,82 juta atau meningkat sebesar

2,9 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Kendal menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 4.104.226,89 juta atau meningkat sebesar 2,8 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000 – 2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 3,1 %.

4.24.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Kendal pada periode 2000-2004 dapat digolongkan rendah dan cenderung meningkat. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Kendal adalah sebesar 0,213 kemudian pada tahun 2001 meningkat menjadi 0,217 dan pada tahun 2002 meningkat menjadi 0,249. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Kendal meningkat menjadi 0,312 namun pada tahun 2004 menurun lagi menjadi 0,240.

Tabel 4.48. Gini Rasio Kabupaten Kendal, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,213	-
2001	0,217	0,004
2002	0,249	0,032
2003	0,312	0,063
2004	0,240	-0,072

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.25. Kabupaten Batang

4.25.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000 – 2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Batang secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.49. Perkembangan PDRB Kabupaten Batang Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	1.741.296,09	-
2001	1.782.266,80	2,353
2002	1.817.972,39	2,003
2003	1.856.898,95	2,141
2004	1.894.108,21	2,004

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Batang menurut harga konstan adalah sebesar Rp 1.741.296,09 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 1.782.266,80 juta atau meningkat sebesar 2,3 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Batang menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 1.817.972,39 juta atau mengalami peningkatan sebesar 2,0 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Batang menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 1.856.898,95 juta atau meningkat sebesar

2,1 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Batang menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 1.894.108,21 juta atau meningkat sebesar 2,0 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000 – 2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 2,1 %.

4.25.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Batang pada periode 2000-2004 dapat dikatakan rendah dan cenderung meningkat. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Batang adalah sebesar 0,196 kemudian pada tahun 2001 meningkat menjadi 0,233 namun pada tahun 2002 menurun lagi menjadi 0,211. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Batang meningkat menjadi 0,258 namun pada tahun 2004 menurun lagi menjadi 0,235.

Tabel 4.50. Perkembangan PDRB Kabupaten Batang Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,196	-
2001	0,233	0,036
2002	0,211	-0,022
2003	0,258	0,047
2004	0,235	-0,023

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.26. Kabupaten Pekalongan

4.26.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000–2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Pekalongan secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.51. Perkembangan PDRB Kabupaten Pekalongan Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	2.200.131,54	-
2001	2.255.088,63	2,498
2002	2.320.647,12	2,907
2003	2.406.190,61	3,686
2004	2.504.933,38	4,104

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Pekalongan menurut harga konstan adalah sebesar Rp 2.200.131,54 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 2.255.088,63 juta atau meningkat sebesar 2,4 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Pekalongan menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.320.647,12 juta atau mengalami peningkatan sebesar 2,9 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Pekalongan menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 2.406.190,61 juta atau meningkat sebesar

3,6 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Pekalongan menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.504.933,38 juta atau meningkat sebesar 4,1 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000 –2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 3,3 %.

4.26.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Pekalongan pada periode 2000-2004 dapat dikategorikan rendah dan cenderung meningkat. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Pekalongan adalah sebesar 0,220 namun pada tahun 2001 menurun menjadi 0,196 kemudian pada tahun 2002 meningkat lagi menjadi 0,205. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Pekalongan meningkat menjadi 0,210 dan kemudian pada tahun 2004 meningkat lagi menjadi 0,232.

Tabel 4.52. Gini Rasio Kabupaten Pekalongan, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,220	-
2001	0,196	-0,024
2002	0,205	0,009
2003	0,210	0,005
2004	0,232	0,022

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.27. Kabupaten Pemalang

4.27.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000–2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Pemalang secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 5.53. Perkembangan PDRB Kabupaten Pemalang Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	2.432.838,17	-
2001	2.502.608,92	2,868
2002	2.587.214,92	3,381
2003	2.685.676,75	3,806
2004	2.791.400,38	3,937

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Pemalang menurut harga konstan adalah sebesar Rp 2.432.838,17 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 2.502.608,92 juta atau meningkat sebesar 2,8 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Pemalang menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.587.214,92 juta atau mengalami peningkatan sebesar 3,3 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Pemalang menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 2.685.676,75 juta atau meningkat sebesar

3,8 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Pemalang menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.791.400,38 juta atau meningkat sebesar 3,9 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000 – 2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 3,5 %.

4.27.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Pemalang pada periode 2000-2004 dapat dikategorikan rendah dan cenderung meningkat. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Pemalang adalah sebesar 0,240 namun pada tahun 2001 menurun menjadi 0,197 kemudian pada tahun 2002 meningkat menjadi 0,210. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Pemalang meningkat menjadi 0,221 dan kemudian pada tahun 2004 meningkat lagi menjadi 0,248.

Tabel 4.54. Gini Rasio Kabupaten Pemalang, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,240	-
2001	0,197	-0,043
2002	0,210	0,013
2003	0,221	0,012
2004	0,248	0,027

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.28. Kabupaten Tegal

4.28.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000–2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Tegal secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.55. Perkembangan PDRB Kabupaten Tegal Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	2.207.446,48	-
2001	2.289.461,27	3,715
2002	2.408.300,04	5,191
2003	2.542.121,31	5,557
2004	2.677.089,69	5,309

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Tegal menurut harga konstan adalah sebesar Rp 2.207.446,48 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 2.289.461,27 juta atau meningkat sebesar 3,7 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Tegal menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.408.300,04 juta atau mengalami peningkatan sebesar 5,1 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Tegal menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 2.542.121,31 juta atau meningkat sebesar

5,5 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Tegal menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 2.677.089,69 juta atau meningkat sebesar 5,3 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000–2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 4,9 %.

4.28.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Tegal pada periode 2000-2004 dapat dikategorikan rendah dan cenderung meningkat. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Tegal adalah sebesar 0,228 namun pada tahun 2001 mengalami penurunan menjadi 0,222 sedangkan pada tahun 2002 meningkat menjadi 0,234. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Tegal meningkat menjadi 0,260 namun pada tahun 2004 mengalami penurunan lagi menjadi 0,230.

Tabel 4.56. Gini Rasio Kabupaten Tegal, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,228	-
2001	0,222	-0,006
2002	0,234	0,012
2003	0,260	0,026
2004	0,230	-0,030

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.29. Kabupaten Brebes

4.29.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000–2004 kinerja perekonomian daerah Kabupaten Brebes secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.57. Perkembangan PDRB Kabupaten Brebes Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	3.360.695,45	-
2001	3.567.515,85	6,154
2002	3.751.724,73	5,164
2003	3.930.501,13	4,765
2004	4.119.445,92	4,807

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Brebes menurut harga konstan adalah sebesar Rp 3.360.695,45 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 3.567.515,85 juta atau meningkat sebesar 6,1 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kabupaten Brebes menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 3.751.724,73 juta atau mengalami peningkatan sebesar 5,1 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kabupaten Brebes menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 3.930.501,13 juta atau meningkat sebesar

4,7 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kabupaten Brebes menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 4.119.445,92 juta atau meningkat sebesar 4,8 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000– 2004 laju pertumbuhan PDRB rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 5,2 %.

4.29.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kabupaten Brebes pada periode 2000-2004 dapat dikatakan rendah dan cenderung meningkat. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kabupaten Brebes adalah sebesar 0,235 kemudian pada tahun 2001 mengalami peningkatan menjadi 0,239 namun pada tahun 2002 mengalami penurunan menjadi 0,227. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kabupaten Brebes meningkat menjadi 0,253 namun pada tahun 2004 menurun lagi menjadi 0,222.

Tabel 4.58. Gini Rasio Kabupaten Brebes, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,235	-
2001	0,239	0,004
2002	0,227	-0,012
2003	0,253	0,027
2004	0,222	-0,031

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.30. Kota Magelang

4.30.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000–2004 kinerja perekonomian daerah Kota Magelang secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.59. Perkembangan PDRB Kota Magelang Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	734.232,69	-
2001	759.504,24	3,442
2002	782.362,45	3,010
2003	811.631,50	3,741
2004	835.952,98	2,997

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kota Magelang menurut harga konstan adalah sebesar Rp 734.232,69 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 759.504,24 juta atau meningkat sebesar 3,4 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kota Magelang menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 782.362,45 juta atau mengalami peningkatan sebesar 3,0 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kota Magelang menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 811.631,50 juta atau meningkat sebesar 2,7 %.

Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kota Magelang menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 835.952,98 juta atau meningkat sebesar 2,9 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000 – 2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 3,3 %.

4.30.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kota Magelang pada periode 2000-2004 rendah dan cenderung menurun. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kota Magelang adalah sebesar 0,277 kemudian pada tahun 2001 mengalami peningkatan menjadi 0,288 namun pada tahun 2002 menurun menjadi 0,277. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kota Magelang menurun menjadi 0,267 dan kemudian pada tahun 2003 menurun lagi menjadi 0,246.

Tabel 4.60. Gini Rasio Kota Magelang, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,277	-
2001	0,288	0,011
2002	0,277	-0,011
2003	0,267	-0,010
2004	0,246	-0,020

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.31. Kota Surakarta

4.31.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000 – 2004 kinerja perekonomian daerah Kota Surakarta secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.61. Perkembangan PDRB Kota Surakarta Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	2.990.464,32	-
2001	3.113.668,99	4,120
2002	3.268.559,54	4,975
2003	3.468.276,94	6,110
2004	3.669.373,45	5,798

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kota Surakarta menurut harga konstan adalah sebesar Rp 2.990.464,32 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 3.113.668,99 juta atau meningkat sebesar 4,1 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kota Surakarta menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 3.268.559,54 juta atau mengalami peningkatan sebesar 4,9 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kota Surakarta menurut harga konstan juga mengalami penambahan

menjadi sebesar Rp. 3.468.276,94 juta atau meningkat sebesar 6,1 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kota Surakarta menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 3.669.373,45 juta atau meningkat sebesar 5,7 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000–2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 5,3 %.

4.31.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kota Surakarta pada periode 2000-2004 dapat dikatakan rendah dan cenderung menurun. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kota Surakarta adalah sebesar 0,278 sedangkan pada tahun 2001 masih tidak mengalami peningkatan atau nilainya sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,278 kemudian pada tahun 2002 meningkat menjadi 0,294. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kota Surakarta menurun menjadi 0,298 namun pada tahun 2004 menurun lagi menjadi 0,264.

Tabel 4.62. Gini Rasio Kota Surakarta, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,278	
2001	0,278	0,000
2002	0,294	0,015
2003	0,298	0,004
2004	0,264	-0,034

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.32. Kota Salatiga

4.32.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000–2004 kinerja perekonomian daerah Kota Salatiga secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.63. Perkembangan PDRB Kota Salatiga Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	624.670,23	-
2001	653.798,40	4,663
2002	679.183,51	3,883
2003	714.424,41	5,189
2004	736.766,67	3,127

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kota Salatiga menurut harga konstan adalah sebesar Rp 624.670,23 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 653.798,40 juta atau meningkat sebesar 4,6 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kota Salatiga menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 679.183,51 juta atau mengalami peningkatan sebesar 3,8 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kota Salatiga menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 714.424,41 juta atau meningkat sebesar 5,1 %. Kemudian pada

tahun 2004 nilai PDRB Kota Salatiga menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 736.766,67 juta atau meningkat sebesar 3,1 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000–2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 4,2 %.

4.32.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kota Salatiga pada periode 2000-2004 dapat dikategorikan rendah dan cenderung menurun. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kota Salatiga adalah sebesar 0,263 namun pada tahun 2001 mengalami penurunan menjadi 0,250 sedangkan pada tahun 2002 meningkat lagi menjadi 0,293. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kota Salatiga meningkat menjadi 0,333 namun pada tahun 2003 menurun lagi menjadi 0,289.

Tabel 4.64. Gini Rasio Kota Salatiga, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,263	-
2001	0,250	-0,013
2002	0,293	0,043
2003	0,333	0,040
2004	0,289	-0,044

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.33. Kota Semarang

4.33.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000–2004 kinerja perekonomian daerah Kota Semarang secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.65. Perkembangan PDRB Kota Semarang Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	14.072.263,75	-
2001	14.456.106,17	2,728
2002	15.243.442,78	5,446
2003	15.991.486,00	4,907
2004	16.690.914,35	4,374

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kota Semarang menurut harga konstan adalah sebesar Rp 14.072.263,75 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 14.456.106,17 juta atau meningkat sebesar 2,7 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kota Semarang menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 15.243.442,78 juta atau mengalami peningkatan sebesar 5,4 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kota Semarang menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 15.991.486,00 juta atau meningkat sebesar 4,9 %.

Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kota Semarang menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 16.690.914,35 juta atau meningkat sebesar 4,3 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000 – 2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 4,4 %.

4.33.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kota Semarang pada periode 2000-2004 rendah dan cenderung menurun. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kota Semarang adalah sebesar 0,353 kemudian pada tahun 2001 mengalami peningkatan menjadi 0,360 sedangkan pada tahun 2002 menurun menjadi 0,305. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kota Semarang menurun menjadi 0,274 namun pada tahun 2003 meningkat lagi menjadi 0,276.

Tabel 4.66. Gini Rasio Kota Semarang, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,353	-
2001	0,360	0,006
2002	0,305	-0,055
2003	0,274	-0,031
2004	0,276	0,002

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.34. Kota Pekalongan

4.34.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000–2004 kinerja perekonomian daerah Kota Pekalongan secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.67. Perkembangan PDRB Kota Pekalongan Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	1.328.663,18	-
2001	1.381.287,59	3,961
2002	1.425.719,21	3,217
2003	1.479.611,35	3,780
2004	1.550.653,50	4,801

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kota Pekalongan menurut harga konstan adalah sebesar Rp 1.328.663,18 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp. 1.381.287,59 juta atau meningkat sebesar 3,9 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kota Pekalongan menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 1.425.719,21 juta atau mengalami peningkatan sebesar 3,2 % bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kota Pekalongan menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 1.479.611,35 juta atau meningkat sebesar

3,7 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kota Pekalongan menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 1.550.653,50 juta atau meningkat sebesar 4,8 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000–2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 3,9 %.

4.34.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kota Pekalongan pada periode 2000-2004 dapat digolongkan rendah dan cenderung menurun. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kota Pekalongan adalah sebesar 0,237 namun pada tahun 2001 mengalami penurunan menjadi 0,229 sedangkan pada tahun 2002 meningkat lagi menjadi 0,251. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kota Pekalongan menurun menjadi 0,241 kemudian pada tahun 2004 menurun lagi menjadi 0,218.

Tabel 4.68. Gini Rasio Kota Pekalongan, Tahun 2000 - 2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,237	-
2001	0,229	-0,009
2002	0,251	0,022
2003	0,241	-0,009
2004	0,218	-0,023

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

4.35. Kota Tegal

4.35.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada periode tahun 2000–2004 kinerja perekonomian daerah Kota Tegal secara keseluruhan menunjukkan prestasi yang positif. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB yang terus meningkat pada tiap tahunnya.

Tabel 4.69. Perkembangan PDRB Kota Tegal Menurut Harga Konstan Tahun 2000 – 2004

Tahun	PDRB (000.000)	Pertumbuhan (%)
2000	691.158,65	-
2001	746.859,56	8,059
2002	784.891,57	5,092
2003	825.671,69	5,196
2004	877.286,65	6,251

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004. BPS Jawa Tengah

Pada tahun 2000 nilai PDRB Kota Tegal menurut harga konstan adalah sebesar Rp 691.158,65 juta. selanjutnya pada tahun 2001 bertambah menjadi Rp.746.859,56 juta atau meningkat sebesar 8,0 %. Pada tahun 2002 nilai PDRB Kota Tegal menurut harga konstan adalah sebesar Rp. 784.891,57 juta atau mengalami peningkatan sebesar 5,0% bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2003 nilai PDRB Kota Tegal menurut harga konstan juga mengalami pertambahan menjadi sebesar Rp. 825.671,69 juta atau meningkat sebesar 5,1 %. Kemudian pada tahun 2004 nilai PDRB Kota Tegal menurut harga konstan adalah sebesar

Rp. 877.286,65 juta atau meningkat sebesar 6,2 %. Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan maka selama periode tahun 2000–2004 laju pertumbuhan rata-rata tiap tahunnya adalah sebesar 6,1 %.

4.35.2. Pemerataan Pendapatan Penduduk

Tingkat kesenjangan pendapatan penduduk Kota Tegal pada periode 2000-2004 dapat dikategorikan rendah dan cenderung menurun. Pada tahun 2000 koefisien Gini Kota Tegal adalah sebesar 0,200 kemudian pada tahun 2001 meningkat menjadi 0,222 sedangkan pada tahun 2002 menurun menjadi 0,237. Pada tahun 2003 koefisien Gini Kota Tegal menurun menjadi 0,222 dan kemudian pada tahun 2004 meningkat lagi menjadi 0,223.

Tabel 4.70. Gini Rasio Kota Tegal, Tahun 2000-2004

Tahun	<i>Gini Ratio</i>	Pertambahan
2000	0,200	-
2001	0,222	0,022
2002	0,237	0,016
2003	0,222	-0,015
2004	0,223	0,001

Sumber : Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 1999 - 2003, BPS Jawa Tengah

BAB V

HASIL PEMBAHASAN

5.1. Pengklasifikasian Pola Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kesenjangan Pendapatan

Metode untuk mengklasifikasikan pola pertumbuhan ekonomi yang terjadi di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah adalah dengan membandingkan nilai laju pertumbuhan PDRB masing-masing Kabupaten/Kota terhadap tingkat pertumbuhan Jawa Tengah. Begitu juga untuk mengklasifikasikan tingkat kesenjangannya adalah dengan membandingkan angka Gini rasio masing-masing Kabupaten/Kota terhadap angka Gini rasio propinsi Jawa Tengah.

5.1.1. Pola Keterkaitan Tahun 2001

- Berdasarkan hasil analisis (di lampiran 3), dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di atas tingkat pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah dan memiliki tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di atas tingkat kesenjangan pendapatan Jawa Tengah (berada di kuadran I) adalah : Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta dan Kota Salatiga. Pada kuadran I ini terjadi keterkaitan hubungan yang positif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk.. Artinya apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi maka tingkat

kesenjangan pendapatan antar penduduk juga akan meningkat. Begitu juga apabila terjadi sebaliknya.

- Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah dan memiliki tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di atas tingkat kesenjangan pendapatan propinsi Jawa Tengah (berada di kuadran II) adalah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sragen, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang dan Kota Semarang.
- Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah dan memiliki tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di bawah tingkat kesenjangan pendapatan propinsi Jawa Tengah (berada di kuadran III) adalah Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. Pada kuadran III ini terjadi keterkaitan hubungan yang positif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk.. Artinya apabila terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi maka tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk juga akan mengalami penurunan. Begitu juga apabila terjadi sebaliknya.

- Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di atas tingkat pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah tetapi memiliki tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di bawah tingkat kesenjangan pendapatan propinsi Jawa Tengah (berada di kuadran IV) adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Pekalongan dan Kota Tegal.

5.1.2. Pola Keterkaitan Tahun 2002

- Berdasarkan hasil analisis (di lampiran 4), dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di atas tingkat pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah dan memiliki tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di atas tingkat kesenjangan pendapatan propinsi Jawa Tengah (berada di kuadran I) adalah : Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, Kota Salatiga dan Kota Semarang. Pada kuadran I ini terjadi keterkaitan hubungan yang positif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk.. Artinya apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi maka tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk juga akan meningkat. Begitu juga apabila terjadi sebaliknya.
- Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah dan memiliki tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di atas tingkat kesenjangan pendapatan penduduk propinsi Jawa Tengah (berada di kuadran II) adalah Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang.

- Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah dan memiliki tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di bawah tingkat kesenjangan pendapatan propinsi Jawa Tengah (berada di kuadran III) adalah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang dan Kota Pekalongan. Pada kuadran III ini terjadi keterkaitan hubungan yang positif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk.. Artinya apabila terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi maka tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk juga akan mengalami penurunan. Begitu juga apabila terjadi sebaliknya.
- Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di atas tingkat pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah tetapi memiliki tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di bawah tingkat kesenjangan pendapatan yang terjadi di propinsi Jawa Tengah (berada di kuadran IV) adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal.

5.1.3. Pola Keterkaitan Tahun 2003

- Berdasarkan hasil analisis (di lampiran 5), dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di atas tingkat pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah dan memiliki tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di atas tingkat kesenjangan pendapatan propinsi Jawa Tengah (berada di kuadran I) adalah : Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purworejo, Kota Surakarta dan Kota Salatiga. Pada kuadran I ini terjadi keterkaitan hubungan yang positif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk.. Artinya apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi maka tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk juga akan meningkat. Begitu juga apabila terjadi sebaliknya.
- Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah dan memiliki tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di atas tingkat kesenjangan pendapatan penduduk propinsi Jawa Tengah (berada di kuadran II) adalah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal dan Kota Semarang.
- Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah dan memiliki tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di bawah tingkat kesenjangan pendapatan propinsi Jawa Tengah (berada di kuadran III) adalah Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten

Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, Kota Magelang dan Kota Pekalongan. Pada kuadran III ini terjadi keterkaitan hubungan yang positif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk.. Artinya apabila terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi maka tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk juga akan mengalami penurunan. Begitu juga apabila terjadi sebaliknya.

- Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di atas tingkat pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah tetapi memiliki tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di bawah tingkat kesenjangan pendapatan yang terjadi di propinsi Jawa Tengah (berada di kuadran IV) adalah Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal.

5.1.4. Pola Keterkaitan Tahun 2004

- Berdasarkan hasil analisis (di lampiran 6), dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di atas tingkat pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah dan memiliki tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di atas tingkat kesenjangan pendapatan propinsi Jawa Tengah (berada di kuadran I) adalah : Kota Surakarta. Pada kuadran I ini terjadi keterkaitan hubungan yang positif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan

tingkat kesenjangan pendapatan penduduk.. Artinya apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi maka tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk juga akan meningkat. Begitu juga apabila terjadi sebaliknya.

- Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah dan memiliki tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di atas tingkat kesenjangan pendapatan penduduk propinsi Jawa Tengah (berada di kuadran II) adalah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kota Salatiga dan Kota Semarang.
- Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah dan memiliki tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di bawah tingkat kesenjangan pendapatan propinsi Jawa Tengah (berada di kuadran III) adalah Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Teamanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, Kota Magelang dan Kota Pekalongan. Pada kuadran III ini terjadi keterkaitan hubungan yang positif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk.. Artinya apabila terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi maka tingkat kesenjangan

pendapatan antar penduduk juga akan mengalami penurunan. Begitu juga apabila terjadi sebaliknya.

- Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi di atas tingkat pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah tetapi memiliki tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di bawah tingkat kesenjangan pendapatan yang terjadi di propinsi Jawa Tengah (berada di kuadran IV) adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal.

5.2. Pola Pergeseran Tipologi 35 Kabupaten/Kota Selama Tahun 2001-2004

Secara umum sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mengalami pergeseran tipologi keterkaitan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk yang terjadi (perpindahan posisi kuadran). Namun dari analisis juga ditemui beberapa Kabupaten/Kota yang selalu berada pada tipologi statis (selalu pada posisi kuadran yang tetap). Adanya fenomena tersebut tidak terlepas dari paradigma pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh masing-masing Kabupaten/Kota tersebut.

Adapun rincian Kabupaten/Kota yang mengalami pergeseran serta yang berada pada posisi statis adalah sebagai berikut :

1. Selama periode tahun 2001-2004, Kabupaten/Kota yang mengalami pergeseran dari Kuadran I ke Kuadran II adalah : Kota Salatiga.
2. Selama periode tahun 2001-2004, Kabupaten/Kota yang mengalami pergeseran dari Kuadran I ke Kuadran III adalah : Kabupaten Sukoharjo.

3. Selama periode tahun 2001-2004, Kabupaten/Kota yang mengalami pergeseran dari Kuadran II ke Kuadran III adalah : Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang.
4. Selama periode tahun 2001-2004, Kabupaten/Kota yang mengalami pergeseran dari Kuadran III ke Kuadran II adalah : Kabupaten Wonosobo.
5. Selama periode tahun 2001-2004, Kabupaten/Kota yang mengalami pergeseran dari Kuadran III ke Kuadran IV adalah : Kabupaten Karanganyar.
6. Selama periode tahun 2001-2004, Kabupaten/Kota yang mengalami pergeseran dari Kuadran IV ke Kuadran II adalah : Kabupaten Klaten.
7. Selama periode tahun 2001-2004, Kabupaten/Kota yang mengalami pergeseran dari Kuadran IV ke Kuadran III adalah : Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Brebes dan Kota Pekalongan.
8. Kabupaten/Kota yang pada tahun 2001 dan tahun 2004 tetap berada di kuadran II, namun pernah mengalami pergeseran, adalah : Kabupaten Banyumas, Kabupaten Sragen dan Kota Semarang.
9. Kabupaten/Kota yang pada tahun 2001 dan tahun 2004 tetap berada di kuadran III, namun pernah mengalami pergeseran, adalah : Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal.

10. Kabupaten/Kota yang pada tahun 2001 dan tahun 2004 tetap berada di kuadran IV, namun pernah mengalami pergeseran, adalah : Kabupaten Cilacap.
11. Selama periode tahun 2001-2004, Kabupaten/Kota yang statis di Kuadran I adalah : Kota Surakarta.
12. Selama periode tahun 2001-2004, Kabupaten/Kota yang statis di Kuadran III adalah : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang.
13. Selama periode tahun 2001-2004, Kabupaten/Kota yang statis di Kuadran IV adalah : Kabupaten Tegal dan Kota Tegal.

5.3. Hasil Temuan Analisis Menurut Hipotesis U Terbalik Simon Kuznets

Berdasarkan hasil analisis pengklasifikasian tipologi keterkaitan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di 35 Kabupate/Kota Jawa Tengah maka dapat disimpulkan bahwa fenomena adanya distribusi pendapatan penduduk yang tidak merata ketika terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi di awal pembangunan juga terjadi di dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah Propinsi Jawa Tengah.

Kenyataan ini dapat dilihat dari jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki pola keterkaitan positif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk. Pada tahun 2001 Kabupaten/Kota yang memiliki pola keterkaitan positif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk berjumlah 22 Kabupaten/Kota (62,8 %), pada tahun 2002 meningkat menjadi 23 Kabupaten/Kota (65,7 %), pada tahun 2003 meningkat lagi menjadi 26 Kabupaten/Kota (74,3 %) dan pada tahun 2004 menurun menjadi 25 Kabupaten/Kota (71,4 %).

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemahasan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa kesimpulan analisis sebagai berikut :

1. Meskipun secara keseluruhan tingkat kesenjangan pendapatan penduduk di 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah relatif rendah (masih di bawah 0,3), namun fenomena adanya keterkaitan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan meningkatnya tingkat kesenjangan pendapatan penduduk juga terjadi di sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pada tahun 2001 Kabupaten/Kota yang mengalami kondisi seperti ini berjumlah 22 Kabupaten/Kota, pada tahun 2002 meningkat menjadi 23 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2003 meningkat lagi menjadi 26 Kabupaten/Kota dan pada tahun 2004 turun menjadi 25 Kabupaten/Kota.
2. Selama periode tahun 2001-2004, sebagian besar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mengalami pergeseran tipologi keterkaitan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan pendapatan (pergeseran posisi kuadran). Namun dari analisis juga ditemukan adanya sejumlah Kabupaten/Kota yang tidak pernah mengalami pergeseran posisi kuadran atau statis. Adapun Kabupaten/Kota yang statis berada di Kuadran I adalah Kota Surakarta. Kabupaten/Kota yang statis di Kuadran III adalah : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten

Kebumen, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang. Kabupaten/Kota yang statis di Kuadran IV adalah : Kabupaten Tegal dan Kota Tegal.

6.2. Rekomendasi

Tingkat perbedaan pendapatan masyarakat selain berasal dari faktor internal individu seperti adanya keterbatasan modal, rendahnya tingkat pendidikan dan lemahnya akses untuk berusaha juga disebabkan dari faktor eksternal yakni ketimpangan pembangunan antar wilayah, perbedaan tingkat kuantitas dan kualitas sumber daya alam yang dimiliki suatu wilayah serta perbedaan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang dimiliki wilayah. Oleh karena itu jika berpijak dari hasil analisis penelitian ini maka rekomendasi yang relevan diajukan guna mengatasi persoalan kesenjangan pendapatan masyarakat di dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah adalah:

1. Pemerintah propinsi Jawa Tengah perlu melaksanakan paradigma pembangunan ekonomi daerah yang berbasis pada permasalahan-permasalahan regional di tingkat Kabupaten/Kota sekaligus untuk koordinasi guna mengatasi tumpang tindih pembangunan yang disebabkan ego kepentingan wilayah.
2. Membangun unit-unit kegiatan ekonomi produktif di daerah-daerah yang kurang maju. Langkah operasional dari pemikiran ini adalah pembentukan unit kegiatan ekonomi produktif yang berbasis pada potensi serta melibatkan masyarakat banyak. Langkah ini cukup tepat bila diterapkan pada daerah yang statis di Kuadran III,

seperti Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang.

3. Membangun dan memberdayakan kemampuan berusaha pada masyarakat yang mengalami hambatan untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif secara mandiri. Upaya ini dilakukan agar kelompok masyarakat miskin memiliki pendapatan tetap. Langkah awal program ini adalah melalui stimulus modal kerja pada masyarakat miskin atau pemberian pendidikan latihan (diklat) praktis yang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Konsep ini cukup tepat bila diterapkan pada daerah seperti Kota Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Ed. 3, Yogyakarta. Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Biro Pusat Statistik, PDRB Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha, 2000-2004, Semarang
- Biro Pusat Statistik, Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi penduduk Jawa Tengah, 2000-2004, Semarang
- Biro Pusat Statistik, Statistik Keuangan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah, 2001-2003, Semarang
- Boediono, 1982. *Teori Pertumbuhan Ekonomi, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta
- Jhingan, ML. 1990. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : CV. Rajawali. (Terjemahan).
- Ikhsan, Moh, 1995. *Indikator-Indikator Makro Ekonomi*, Jakarta : Edisi 2 Lembaga Penerbit FE UI.
- Haeruman. 1996. *Pembangunan Daerah dan Peluang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah*. Jakarta : Prisma No. Khusus 25 Tahun (1971-1996) Tahun XXV.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta : Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Prayitno, Hadi dan Budi Santosa, 1996. *Ekonomika Pembangunan*, Jakarta : Gahlia Indonesia.
- Suharto. 2001. *Distribusi Pendapatan Dalam Pembangunan*. Yogyakarta : Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.6. No.1, 2001.
- Suryana, 2000. *Ekonomika Pembangunan*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Syafrizal. 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Jakarta : Prisma Vo.3 Maret 1997.
- Tambunan, Tulus, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta : Gahlia Indonesia.

Todaro, Michael. P, 1989. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Jakarta : PT Erlangga (Terjemahan).